



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

Jl Dewi Sartika No. 118 Telp. (0231) 325429, 321197,

321198 Pesawat 317

S U M B E R

TAHUN 2022

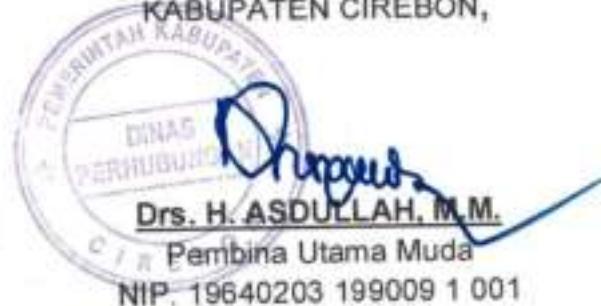
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dapat tersusun.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Demikian semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi informasi / bahan dalam pembahasan forum OPD dan penyusunan perubahan RKPD 2022 Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	9
TAHUN BERKENAAN.....	9
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berkennaan dan Capalan RenstraPerangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu—isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahanl RKPD.....	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
BAB III.....	70
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.....	70
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	70
3.2. Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	72
3.3. Program dan kegiatan	73
BAB IV.....	86
PENUTUP.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD pada khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Penyusunan Renja SKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun dimana penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RKPD, Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas,

review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut yang dituangkan didalam rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Rencana kerja tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD.

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6), dan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja SKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh bidang serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Landasan hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950,

- Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan SKPD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SKPD (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dinas (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang "Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon" (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 seri D.4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

1.3. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Rencana kerja dibuat sebagai pedoman agar pelaksanaannya terarah, terencana, dengan harapan akan diperoleh hasil yang sesuai dengan yang telah ditentukan.

b. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi, dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian .

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, Analisis Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan, Isu-isu Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berkенаan dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Dalam rangka memantapkan Perubahan rencana kerja tahun 2022 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Semester I (TW II) tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan renja tahun berkenaan dan capaian renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan realisasi Hasil kinerja program/kegiatan pada rencana kerja tahun 2022 Sampai dengan Semester I (TW II) secara garis besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai sudah baik, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

EVALUASI RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN 2022 S.D SEMESTER I (TW II)

Tabel 2.1

No	Satuan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah (PD) Akhir Tahun 2022	Capaian Kinerja sampai dengan Semester I (2022)	Realisasi Capaian Kinerja Rancangan Daerah s.d. Tahun yang lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)		Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Rencana perangkat Daerah Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021
							K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00.00.	NOH BIDANG UJIAN	PROGRAM PENUNJANG UJIANAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Penunjang Pelajaran Administrasi Pemerintahan, (Satuan: Non Kunci dan Hasil)	100	7.811.000.000	0	100	7.496.023.017	100	0	100
0.00.01.	Peningkatan Pendidikan Perkantoran yang memadai		Peningkatan Penunjang Diklat Ahli Profesi, (Satuan: Non Kunci dan Hasil)	100	3.178.000.000	0	100	150.944.204	100	1.51.944.204.000	100
0.00.02.			Peningkatan Penunjang Ciptaan Karya, (Satuan: Non Kunci dan Hasil)	100	3.460.000.000	0	100	54.724.876	100	54.724.876.000	100
0.00.03.			Peningkatan Komitmen Program Bantuan Kades, (Satuan: Non Kunci dan Hasil)	100	394.000.000	0	100	5.165.570	100	0	1.165.570.000
0.00.04.			Peningkatan Penunjang Sistem dan Praktika Apresiasi, (Satuan: Non Kunci dan Hasil)	80	265.122.000.000	18,57	19.354.864.816	0	113.075.401	80	41.472.703.748.096
0.00.05.2.01.			Peningkatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2.281.000.000	0	80.465.270	0	4.413.764.446	4	4.413.764.446.000
0.00.06.1.01.			Peningkatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	1.510.000.000	2	36.576.703	0	63.280.000	8	63.280.000.000
0.00.06.1.01.02.			Konfidensi dan Penyampaian Dokumen KUA-KSPD	2	50.000.000	0	0	0	0	-	0
0.00.06.1.01.03.			Konfidensi dan Penyampaian Dokumen Perilaku BCA-KSPD	1	50.000.000	0	0	0	0	-	0
0.00.06.1.01.04.			Konfidensi dan Penyampaian DPA-KSPD	1	50.000.000	0	0	0	0	-	0
0.00.06.1.01.05.			Konfidensi dan Penyampaian Perubahan DPA-KSPD	1	50.000.000	0	0	0	0	-	0
0.00.06.1.01.06.			Konfidensi dan Penyampaian Laporan Ciptaan Karya dan Kunci dan Hasil Riset dan Karya KSPD	1	150.000.000	1	17.451.000	0	4	26.938.000	4
0.00.06.1.01.07.			Fokus Kunci dan Penyampaian Karya, (Satuan: Kunci dan Hasil)	1	150.000.000	1	26.492.165	0	69.017.600	3	73.194.13.16.000
0.00.06.1.01.08.			Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	51.530.000.000	0	3.579.888.156	0	3.794.835.445.000	2	3.794.835.445.000.000
0.00.06.1.01.09.			Perjalanan Gaji dan Tunjangan ASN	64	10.070.000.000	66	3.477.107.811	0	66	9.763.875.200	1.00
0.00.06.1.01.10.			Perjalanan Administrasi Pendidikan Tiga Asn	1	11.000.000	0	0	0	0	-	0

0.00.01.2.01.01.	Pelaksanaan Perintahdilakukannya dan Pengujian/Verifikasi Kuantitas SKPD	-	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.02.01.	Koordinasi dan Pelaksanaan Aplikasiasi WFO	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.02.02.	Koordinasi dan Pengujian Laporan Keuangan Akhir Tahun, SKPD	-	17.874.400	1	17.874.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.02.03.	Pengujian dan Pengujian Balita Tanggung Pematuhan	-	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pengujian Laporan Keuangan Balita/Timbang/Sistematisasi SKPD	-	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.02.05.	Pengujian dan Analisis Pengujian Realisti	-	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765	1.401.765
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perubahan Daerah	-	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.01.	Pengurusan Perintahdilakukan Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD	-	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.02.	Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	-	412.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.03.	Terindaya Pengurusan Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD,	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.04.	Terindaya Pengurusan Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD,	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.05.	Terindaya Dokumen Pustaka Banting Hilis Daerah SKPD,	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.06.	Terindaya Pengurusan Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD,	-	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.07.	Terindaya Dokumen Pustaka Banting Hilis Daerah SKPD,	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.08.	Terindaya Dokumen Pustaka Banting Hilis Daerah SKPD,	-	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.09.	Terindaya Pengurusan Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD,	-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.03.10.	Terindaya Dokumen Pustaka Banting Hilis Daerah SKPD,	-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.01.	Pengurusan Pengelitian dan Rekam Data	-	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.02.	Analisa dan Pengembangan Rencana Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Rencana Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.03.	Pengelitian dan Pengembangan Kebijakan Rencana Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.04.	Pengelitian dan Penyebarluasan Objek Reklamasi Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.05.	Pengelitian Data Rencana Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.06.	Pengelitian Wajib Reklamasi Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelitian Bantuan Daerah	-	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.	Administrasi Kolaborasi Perangkat Daerah	-	3.621.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.01.	Pengurusan Sarana dan Prasarana Daerah Pergawai	-	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.02.	Pengurusan Pustaka Daerah Bantuan	-	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.03.	Pengurusan Administrasi Kegawai	-	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kependidikan	-	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0.00.01.2.05.05.		Penitikanan Monevring, Teknisi dan Pendataan Kewajib. Pengawal. (Satuan: Keg - Karimataff)	4	13.000.000	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.06		Pendataan dan Puluhan Pegawai Berstandart Tinggi dan Profil	10	140.000.000	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.10.		Sosialitas Peraturan Perundang- undangan	-	100.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.11.		Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	-	100.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.140.000.000	0	0	0	0	410.142.318	0	0	0	1.013.181.580	0	0	0	0
0.00.01.2.06.01		Pengelolaan Komponen Instabilitas Politik dan Persepsi Bangsa Kultur	8	11.140.000.000	0	0	0	0	11.057.960	0	0	0	12.037.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.02.		Pengelolaan Peraturan dan Perangkatdaun Kultur	0	75.000.000	0	0	0	0	53.196.270	0	0	0	108.162.520.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.05.		Pengelolaan Barang Cerdak dan Perangkatdaun	13	100.000.000	0	0	0	0	213.365.960	0	0	0	213.365.960.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.06		Pengelolaan Bahan Barisan dan Peraturan Perundang- undangan	8	1.000.000.000	0	0	0	0	57.789.600	0	0	0	57.789.600.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.07.		Pengelolaan Bahan-Barisat	-	170.000.000	0	0	0	0	88.372.618	0	0	0	94.910.500.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.08.		Pihakti Karyayana Tani	40	1.500.000.000	0	0	0	0	146.3	0	0	0	12.980.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.09.		Pengelolaan Kapas Kooperasi dan Komunitas	150	50.000.000	0	0	0	0	41.798.941	0	0	0	99.175.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.10.		Pengelolaan Aset Dinas/ptsp/SPD	-	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639.417.948.000	0	0	0	0
0.00.01.2.06.11.		Dokumen Reklamasi Elemen Fisikruan Berbasis Elektronik,plus SKPD	6	50.000.000	0	0	0	0	1037.417.348	0	0	0	1.639.417.948.000	0	0	0	0
0.00.01.2.07.		Pengelolaan Barang Milik Daerah Perundang- undangan	3	30.000.000.000	0	0	0	0	63.423.458	0	0	0	192.451.000.000	0	0	0	0
0.00.01.2.07.01.		Pengelolaan Kandungan Peraturan Dinas atau Kondisi dan Dinas/Jabatan, (Satuan: Unit - Karimataff)	2	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.02.		Pengelolaan Kondisi dan Dinas/ Organisasi atau Lembaga	1	4.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.05.		Pengelolaan Hotel	10	150.000.000	0	0	0	0	43.473.418	0	0	0	84.217.000	0	0	0	0
0.00.01.2.07.06.		Pengelolaan Perizinan dan Marin Larinya	3	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.08.		Pengelolaan Galung Kamar atau Bongkam Larinya	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.10.		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bongkam Larinya	10	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.11.		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bongkam Larinya	10	200.000.000	0	0	0	0	29.399.086.848	0	0	0	29.399.086.848.000	0	0	0	0
0.00.01.2.07.08.		Terpaduaya Perwali) dan Penitikanan Gedung (Satuan: Unit - Karimataff)	-	1.807.151.330	0	0	0	0	95.737.992.408	0	0	0	95.737.992.408.000	0	0	0	0
0.00.01.2.07.09.		Terpaduaya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Satuan: Unit - Karimataff)	1	197.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.07.10.		Terpaduaya Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor (Satuan: Unit - Karimataff)	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.08.01.		Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	38.021.000.000	0	0	0	0	1.871.151.330	0	0	0	31.912.864.142.000	0	0	0	0

0.00 01.2.00.01.	Pembakaran Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor (Satuan: Kg - Kursusif)	Terpendekan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor (Satuan: Kg - Kursusif)	10	210.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1.00	0.00
0.00 01.2.00.04.	Pembakaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpendekan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan: Orang - Kursusif)	50	1.900.000.000,-	0	0	0	1.905.684.310	50	0	50	1.905.684.310.000,-	0	1.00	0.51	
0.00 01.2.00.05.	Pemeliharaan Bantuan & Milik Dinas/Departemen Uraian Pemeliharaan Dinas	Terpendekan Jasa Pemeliharaan Bantuan Pilk. Dinas Pemeliharaan Uraian Pemeliharaan Dinas. (Satuan: Kepala)	5	1.5.40.000.000,-	0	273.049.815	0	3	1.681.532.215.000,-	5	1.681.532.215.000,-	1.00	0.12			
0.00 01.2.00.07.	Pembakaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Konstruksi dan Perawatan Cuci atau Kebersihan Orang (jasa/jasa)	Terpendekan Jasa Pemeliharaan Rumah / Benda Kantor dan Dinas / Operasional. (Satuan: Orang - Non Kursusif)	16	310.000.000,-	16	55.700.000	0	16	114.340.000	16	114.340.000.000,-	1.00	0.39			
0.00 01.2.00.02..	Pembakaran Jasa Pemeliharaan Bahan Penelitian dan Pjok, dan Perbaikan Kantor dan Dinas Operasional dan Lippangan	Terpendekan Jasa Pemeliharaan Rumah / Benda Kantor dan Dinas (Satuan: Unit - Non Kursusif)	58	500.000.000,-	22	4.81.3.900	0	58	41.595.000	58	41.595.000.000,-	1.00	0.08			
0.00 01.2.00.05.	Pembakaran Produk	Terpendekan Pemeliharaan Produk (Satuan: Unit - Kursusif)	30	50.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1.00	0.00
0.00 01.2.00.06.	Pemeliharaan Perlakuan dan Pihak Lainnya	Terpendekan Pemeliharaan Perlakuan dan Pihak Lainnya. (Satuan: Unit - Non Kursusif)	30	1.920.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1.00	0.00
0.00 01.2.00.09.	Pemeliharaan Bahan/Bahan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpendekan Pemeliharaan Rumah / Benda Gedung Kantor. (Satuan: Gedung - Non Kursusif)	1	1.000.000.000,-	0.48	190.310.915	0	1	474.012.405.000,-	1	474.012.405.000,-	1.00	0.42			
0.00 01.2.00.10.	Pemeliharaan Bahan/Bahan/Servis dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpendekan Pemeliharaan Rehatan dan Servis dan Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. (Satuan: Unit - Non Kursusif)	1	1.200.000.000,-	1	203.50.000	0	1	49.750.000.000,-	1	49.750.000.000,-	1.00	0.05			
0.00 01.2.00.12.	Pemeliharaan Rehatan/Tarif	Terpendekan Pemeliharaan Rehatan/Tarif. (Satuan: Hari - Kursusif)	5000	500.000.000,-	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	-	1.00	0.00
2.1.6. BUDIDAYA LUMUTAN URAIAN PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN																
2.1.6.1.	Pembudidayaan Berdasarkan Jenis Berkelanjutannya	Rasio sehat dan Pemarasan Pengolahan Jagung (Satuan: Pinten : Non Kursusif Menghitung)	75	4.360.000.000,-	50	0	1.05	808.680.710	60	0	60	808.680.710.000,-	0.81	0.19		
		Pemarasan jaraknya antara tanah lama dan tanah (Satuan: Pinten - Non Kursusif Menghitung)	82	8.460.000.000,-	0	0	75	360.807.050	84	0	139	360.807.050.000,-	1.94	0.04		
		Rasio Konservasi Tanah dan Pemarasan Perekatongan (Hab dan Terminil) yang Ratah Impresif (Satuan: Pinten - Non Kursusif Menghitung)	97.45	23.540.000.000,-	50	0	74.29	7.642.178.301	46.93	0	121	7.642.178.301.000,-	1.14	0.38		
		Pemarasan tanah dan tanah lama dan pemarasan Pengarasan Lada Laut yang berfungsi dengan baik. (Satuan: Pinten - Non Kursusif Menghitung)	75	70.031.239.936	0	0	66.18	279.775.317	55	0	121	279.775.317.000,-	1.61	0.00		
		Pemarasan tanah lama dan tanah (Satuan: Pinten - Non Kursusif Menghitung)	67.04	16.2.745.000.000,-	70.49	377.500.094	0	66.80	1.424.132.200	47	0	1.424.132.200.000,-	0.99	0.01		
		Pengembangan Penerapan Konservasi Pemarasan dan tanah serta tanah untuk pembangunan ting ting dengan HPPC (Pinten Stabilis Pemasir dan Kotek), (Satuan: Pinten - Non Kursusif Menghitung)	50	427.718.375.980,-	0.01	1.231.849.223	0	416.011.220	41.50	18.600.015.940	48	18.600.015.940.000,-	0.81	0.04		
		Meningkatnya keberlanjutan berkelanjutannya														
		Meningkatnya keberlanjutan dan berkelanjutannya														

2.15.02.1.01.	Pembangunan Infrastruktur Resorca Infrastruktur jaringan LLAJ Kabupaten Kotam	Terdakwa Dokumen Resorca Infrastruktur jaringan LLAJ Kabupaten, (bantuan: OJK)	3	6.191.733.048	0	9.481.100	0	1	421.836.100	1	431.836.100.000	0.13	0.07	
2.15.02.1.01.01.	Pembangunan Infrastruktur Resorca Infrastruktur jaringan LLAJ Kabupaten Kotam	Terdakwa Perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas penunjang (dataran - Kemandir)	3	8800.000.000	0	0	0	1	0	1	-	0.00	0.00	
2.15.02.1.01.02.	Pembangunan Infrastruktur dan Sosialisasi Resorca Infrastruktur jaringan LLAJ Kabupaten Kotam	Jenis Kelahan Transportasi Terbangun Pada Hari ini, (bantuan: Diklatarm - Kemandir)	2	300.000.000	0	9.481.100	0	1	14.878.700	2	143.878.700.000	1.09	0.48	
2.15.02.1.01.03.	Pengembangan Perekonomian Bencana (bantuan jaringan Kabupaten Kotam)	Terdakwaanya Pengembangan Bencana tidak jaringan LLAJ Kabupaten, (bantuan: Krigatin - Non Kemandir)	1	350.000.000	0	0	0	1	9.720.594.401.000	1	9.720.594.401.000	1.00	38.88	
2.15.02.1.01.04.	Pembangunan Perangkatwan jalan di jalan Kabupaten Kotam	Terdakwaanya Perangkatwan jalan di jalan Kabupaten, (bantuan: jalan)	10	392.270.572.496	0	2.463.815.895	0	10	41.201.751.520	10	41.201.751.520.000	1.00	0.10	
2.15.02.1.01.05.	Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Terdakwaanya Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten, (bantuan jalan - Kemandir)	10	11.238.273.000	1	102.412.418	0	10	620.081.260	10	620.081.260.000	1.00	0.06	
2.15.02.1.01.06.	Pembangunan Perangkatwan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Terdakwaanya Pembangunan Perangkatwan jalan di jalan Kabupaten, (bantuan jalan - Kemandir)	10	400.000.000	0	2.046.323.577	0	10	400.000.000	10	400.000.000.000	1.00	0.12	
2.15.02.1.01.07.	Pembangunan Perangkatwan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Terdakwaanya Pembangunan jalan Umum, (Bantuan: bantuan Kemandir)	4000	468.000.000	0	2.046.323.577	0	4000	12.64.454.000	4000	12.64.454.000.000	1.00	0.00	
2.15.02.1.01.08.	Pembangunan Perangkatwan Prasarana jalan, (Gantian jalan - Non Kemandir)	Terdakwaanya Pembangunan Prasarana jalan, (Gantian jalan - Non Kemandir)	10	1.000.000.000	0	0	0	10	0	10	-	1.00	0.00	
2.15.02.1.01.09.	Rahabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan	Terdakwaanya Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Perangkapatan jalan (pjl), (Bantuan: Bantuan Kemandir)	3020	12.000.000.000	129	314.858.000	0	708.475.387	3000	856.385.580	3000	1.663.385.413.000	1.00	0.14
2.15.02.1.01.10.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C	Terdakwaanya Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan Terminal Penumpang Tipe C dan Stasiun Perdagangan (Stasiun Lintas)	3	137.087.000.000	0	191.891.054	0	1	1.242.703.000	1	1.341.703.000.000	0.33	0.03	
2.15.02.1.01.11.	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Terminal Penumpang Tipe C	Terdakwaanya Perbaikan Dokumen Resorca Perbaikan Terminal Penumpang Tipe C, (bantuan: Kemandir)	2	250.000.000	0	0	0	2	0	2	-	1.00	0.00	
2.15.02.1.01.12.	Pembangunan Gedung Terminal	Terdakwaanya Gedung Terminal di Kedepatan Cirebon, (Bantuan: Gedung - Kemandir)	1	32.400.000.000	0	0	0	1	0	1	-	1.00	0.00	
2.15.02.1.01.13.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terdakwaanya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Terminal (bantuan: bantuan BPTT, bantuan Lahan - Kemandir)	10	3.000.000.000	0	10.169.900	0	10	199.601.400	10	199.601.400.000	1.00	0.07	
2.15.02.1.01.14.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Pabrik Ukuran dan Pordukung)	Terdakwaanya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Pabrik Ukuran dan Pordukung) (Bantuan: bantuan Kemandir)	10	1.000.000.000	0	4.186.100	0	10	199.949.800	10	199.949.800.000	1.00	0.20	
2.15.02.1.01.15.	Penggarisan Kapal dan SDH Penggarisan Terminal Tipe C	Jenis SDHP penggarisan Terminal Kapal dan perahu (bantuan orang - Kemandir)	20	178.765.854	15	302.767.150	20	381.299.800	30	884.064.800.000	1.00	0.91		
2.15.02.1.01.16.	Pembangunan Sarana dan Perbaikan Fasilitas Pabrik	Terdakwaanya Tarakan Pabrik dan Tegarrahawa Pabrik Perjalanan Perangkatwan Pabrik, (bantuan: bantuan orang - Kemandir)	6	14.446.024.600	0	34.986.752	0	2	1.811.910.000	2	1.811.910.000.000	0.13	0.40	

2.15.01.2.06.03.	Up Gaji dan Sosialitas Pelaksanaan dan Pekemis Laka Lintas untuk jenjang jalan Kabupaten/Kota	Yakobimulyo Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Haqiqiyah dan Religius Laka Lintas untuk jenjang Jalan Kabupaten/Kota. (Satuan Keg - Komunitas)	3	500.000.000	0	0	0	0	3	102.372.600	3	102.352.400.000	1.00	0.20
2.15.01.2.06.04.	Pengembangan dan Pengretakan Pelaksanaan Kolaborasi untuk jalan Kabupaten/Kota	Terkaitanya Pengembangan dan Pengretakan, (Satuan Kegiatan - Komunitas)	12	1.070.000.000	0	0	0	0	12	844.898.200	12	644.850.200.000	1.00	0.83
2.15.02.2.06.05.	Forum Laka Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota	Terlibatanya Forum/Laka Lintas dan angkutan lalu lintas jalan Kabupaten - Komunitas	6	300.000.000	1	26.957.300	0	0	72.417.200	8	448.11.190.000	1.00	1.49	
2.15.02.2.07.01.	Persentuhan Haidi Andhika Dampak Laka Lintas (AniesBella) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen resmi yang di serap oleh ditambah dengan hasil, (Satuan Dok)	76	7.634.999.072	0	1.13.345.274	0	0	1.123.071.800	22	1.123.071.800.000	0.13	0.13	
2.15.02.2.07.01.	Persentuhan Kebutuhan Tahu Ketela Pekalongan	Terwujudnya Dokumen Tahu Pekalongan Laku Lintas di Kabupaten Cirebon, (Satuan Dok - Komunitas)	2	600.000.000	0	16.544.200	0	0	133.064.200	1	133.064.200.000	1.00	0.12	
2.15.02.2.07.02.	Pengembangan Kapasitas Pustaka AniesBella	jumlah Pustaka AniesBella yang profesional, (Satuan orang - Komunitas)	1	100.000.000	0	0	0	0	5	0	5	-	1.00	0.00
2.15.02.2.07.01.	Konsolidasi dan Seluruhnya Pekalongan Hilir AniesBella	Terlaksananya Konsolidasi dan Seluruhnya Pekalongan Hilir AniesBella, (Satuan Kegiatan - Komunitas)	30	450.000.000	13	36.793.074	0	0	241.129.400	30	241.129.400.000	1.00	0.54	
2.15.02.2.07.04.	Pengembangan Persentuhan Pekalongan AniesBella	Terlaksananya Pengembangan Persentuhan AniesBella, (Satuan Kegiatan - Komunitas)	6	210.000.000	0	0	0	0	6	0	6	-	1.00	0.00
2.15.02.2.08.06.	Audit dan Inspeksi Kesehatianan LLN di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Kesehatianan, (Satuan Kegiatan)	15	2.240.000.000	0	0	0	0	441.250.200	3	441.150.200.000	0.13	0.16	
2.15.02.2.08.01.	Pengembangan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLN	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLN, (Satuan Organ - Komunitas)	30	30.000.000	0	0	0	0	30	0	30	-	1.00	0.00
2.15.02.2.08.02.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaianan Unit Pekalongan Ujung Bantul Kemandirian Sumatra	Terlaksananya inspeksi, Audit dan Penilaianan Lalu Lintas Ujung Bantul Kemandirian Sumatra, (Satuan Keg - Komunitas)	12	100.000.000	0	0	0	0	12	55.091.400	12	55.091.400.000	1.00	0.11
2.15.02.2.08.01.	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Penilaianan Terusan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Penilaianan Terusan, (Satuan Kegiatan - Pem. Komunitas)	4	100.000.000	0	0	0	0	4	0	4	-	1.00	0.00
2.15.02.2.08.04.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaianan Penilaianan, Penilaianan dan Pengembangan Kompetensi Perguruan Tinggi Kemandirian Berintegritas, (Satuan Keg - Komunitas)	Terlaksananya Penilaianan, Pengembangan Kompetensi Kemandirian Berintegritas, (Satuan Keg - Komunitas)	4	50.000.000	0	0	0	0	4	43.040.000	4	45.040.000.000	1.00	0.90
2.15.02.2.08.01.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaianan Sistem Manajemen Kualitas dan Penilaianan Penerapan Anggaran Universitas	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Penilaianan Sistem Manajemen Kualitas dan Penilaianan Penerapan Anggaran Universitas, (Satuan Keg - Komunitas)	6	150.000.000	0	0	0	0	48.952.000	6	108.804.120.000	1.00	0.44	
2.15.02.2.09.	Penerapan Anggaran Universitas untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antara Kota dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan Polaikan Fr (jasa dalam Penerapan Anggaran, (Satuan Dok)	700	1.918.000.000	0	3.117.200	0	0	408.41.3.900	100	408.41.3.900.000	0.13	0.11	
2.15.02.2.09.01.	Terwujudnya Sistem Pelaporan Polaikan Ira Anggaran, (Satuan Apakan - Pem. Komunitas)	Terwujudnya Sistem Pelaporan Polaikan Ira Anggaran, (Satuan Apakan - Pem. Komunitas)	1	150.000.000	0	3.117.200	1	49.548.700	1	49.548.700.000	1.00	0.20		

2.15.02.2.10.02.	Pengabdian dan Pengembangan Keterwujudan Angkatan Unsur untuk Jalin Angkatan Orang tua dan atau Bapak dan Ibu dari I (Satu) Kali/tiga/tujuh/ketiga	Telah dilaksanakan Kordinasi dan Monitoring Jln. Tegal- Sanan Kaganan -Krembung	4	200.000.000	1,98	0	0	0	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	86.392.500	4	
2.15.02.2.10.03.	Pengabdian Kedidikan Pemimpin Karsastra Perkotaan untuk Angkatan Perkotaan Kewenangan Kebutuhan/Kota	Telah dilaksanakan Pertemuan Karsastra Perkotaan untuk Angkatan Perkotaan Kewenangan Kebutuhan/Kota. (Satuan Dok - Krembung)	-	5.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.10.04.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebutuhan Pemimpin Karsastra Perkotaan untuk Angkatan Perkotaan Kewenangan Kebutuhan/Kota	Terlaksanaanya sosialisasi dan uji coba Kebutuhan Pemimpin Karsastra Perkotaan untuk Angkatan Perkotaan Kewenangan Kebutuhan/Kota. (Satuan Dok - Krembung)	-	5.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Pertemuan Rencana Umum Jaringan Trasportasi Perkotaan dalam I (Satu) Dicab. Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan pertemuan Rencana umum jaringan Trasportasi Perkotaan dalam I (Satu) Dicab. Kabupaten/Kota	-	200.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.11.02.	Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trasportasi Pedestrian dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pertemuan rencana Umum jaringan Trasportasi Pedestrian dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	3	1.065.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.12.01.	Pengaruan Kegiatan Rencana Umum Jaringan Trasportasi Pedestrian Kewenangan Kebutuhan/Kota	Telah dilaksanakan Rencana Umum jaringan Trasportasi Pedestrian Kewenangan Kebutuhan/Kota. (Satuan Dok - Krembung)	2	1.501.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.12.02.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebutuhan Kewenangan Karsastra Perkotaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebutuhan Kewenangan Karsastra Perkotaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	-	1.501.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.13.04.	Pembentukan dan Pengembangan Angkatan Orang dalam Trasportasi Lauta Daerah Kabupaten/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pembentukan dan Pengembangan Angkatan Orang dalam Trasportasi Lauta Daerah kabupaten/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	3	2.294.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.01.	Fasilitasi pemenuhan penyediaan dan pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Penyediaan dan Pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	-	1.643.1.00	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.02.	Kordinasi dan informasi pengembangan pelaksanaan izin kelayaran orang dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Kordinasi dan informasi pengembangan izin kelayaran orang dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	-	1.00.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.03.	Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trasportasi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pelaksanaan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trasportasi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	2	450.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.04.	Angkutan Orang dalam Pengembangan dan Pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	3	1.061.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.05.	Pengabdian dan Pengembangan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dalam Perkotaan dan Perdesaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pengabdian dan Pengembangan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dalam Perkotaan dan Perdesaan dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	4	50.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.06.	Angkutan Orang dalam Pengembangan dan Pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan tanah Kawasan yang berada di dalam Trasportasi Orang dalam Trasportasi Kewenangan Kebutuhan/Kota dalam I (Satu) Dicabik Kabupaten/Kota	5	1.061.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.07.	PROGRAM BENGEL OLAHAN #LAYARAN	Telah dilaksanakan pelaksanaan program BENGEL OLAHAN #LAYARAN	2	2.030.000.000	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2.15.02.2.14.08.	Masing-masing yang berdasarkan yang berdasarkan																									

2.15.01.2.11.	Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Wajib bagi Orang Penyeberang Atas Bahan Usaha yang Berdimensi dan Peng Bemerasal Pada Lautan Perhubungan Dalam Daerah Kekepulauan Kita	Terlaksanaanya Penerbitan Dokumen dan Apabila itu secara elektronik. (Satuan: Duk)	2	1000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.23	0.00
2.15.01.2.02.01.	Fasilitasi Penerapan Peraturan Perundian (Ran Angkutan Laut Pelayaran Raya) Kementerian Keluargano/Coce dalam Sistem Pelayaran Perutama Berbasis Tertinggi ini secara Elektronik	Terlaksanaanya Penerapan Dokumen dan Apabila itu secara elektronik. (Satuan: Duk - Non Kursusif)	2	1000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.15.01.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Raya: Kawasan Lautan Kita/Kawasan Kita	Wirkaksanaanya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Ijin Usaha angkutan laut Dokumen elektronik fungsi: (Satuan: Ing - Kursusif)	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.15.01.2.08.	Penerbitan Ijin Usaha Jasa Terbatas dengan Permitas dan Perbaikan Kapal	Terlaksanaanya Penerapan Dokumen Usaha Permitas dan Perbaikan kapal secara elektronik. (Satuan: Duk)	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.23	0.00
2.15.01.2.08.01.	Fasilitasi Penerapan Peraturan Perundian Ijin Usaha Jasa Terbatas dengan Permitas dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayaran Perutama Berbasis Tersinggal - Secara Elektronik	Terlaksanaanya Penerapan Apabila Penerapan Peraturan terbatas Permitas dan Perbaikan Kapal secara elektronik. (Satuan Duk - Kursusif)	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.15.01.2.08.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perkembangan Ijin Usaha Jasa Terbatas dengan Permitas dan Perbaikan Kapal	Terlaksanaanya Pengembangan Perkembangan dan Perbaikan Kapal. (Satuan: Dokumen Ingatkan - Non Kursusif)	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Rincian pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan semester 1 (satu) yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

2.1.1. Non Urusan

Pelaksanaan non urusan Tahun 2022 Dinas Perhubungan melaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan melaksanakan 1 (satu) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Memadai dengan Indikator Program Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima dengan target kinerja 80 %, dan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.623.938.347,00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja tahun 2022 sempai dengan semester 1 (satu) sebesar 60.30 % dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 19.346.846.916,00

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dengan Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektoral 7 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.280.080,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan tingkat persentase

pencapaian kinerja renja sebesar 28.57 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.526.105

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator Terlaksanakanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan 3 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.017.400,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1.50 Kegiatan dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.992.165

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan Indikator Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.958.080,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 5 Dokumen dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 83.33 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.451.000

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan Indikator Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan 67 Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.065.805.200

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 66 Pegawai dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 98.51 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.477.409.891

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dengan Indikator Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.874.600,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan tingkat persentase pencapaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.874.600

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dengan Indikator Tersusunnya Laporan Keuangan Periode 2 Dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.732.000,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1.49 Dokumen dengan tingkat persentase pencapaian kinerja sebesar 74.50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.901.765

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dengan Indikator Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai 5 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.422.000,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 5 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.904.229,-

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Dengan Indikator Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 40 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.920.500,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 29 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 49.75 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.532.658,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dengan Indikator Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 13 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.365.900.00,-

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 13 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.486.168,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Dengan Indikator Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.057.000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 5 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja sebesar 71.43 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.028.500,-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan Indikator Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 6 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108,162,520.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 4 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 66.67 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.396.270,-

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dengan Indikator Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,789,600.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 3.98 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 49.75 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.900.000,-

- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dengan Indikator Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Dinas 1463 Orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.990.000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 566 Orang dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 38.69 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.020.000,-

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dengan Indikator Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.175.000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 115 Kali dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 46 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.778.942,-

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Dengan Indikator Terpenuhinya Meubelair 14 Buah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64,217,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 10 Buah dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 71.43 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.423.458,-

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan Indikator Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Rekening dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31,912,664,142.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 4 Rekening dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.871.151.350,-

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dengan Indikator Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114,340,000.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 16 Unit dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.900.000,-

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dengan Indikator Terpenuhinya Jasa Perizinan KIR dan STNK 58 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,595,000.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 22 Unit dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 37.93 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.813.900,-

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dengan Indikator Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 424,822,405.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0.48 Gedung dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 48 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.305.915,-

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dengan Indikator Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49,750.000,00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1 Unit dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.350.000,-

2.1.2. URUSAN PERHUBUNGAN

Pelaksanaan urusan perhubungan Tahun Anggaran 2022, Dinas Perhubungan melaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan melaksanakan 1 (Satu) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Dengan menjalankan 2 indikator kinerja :

- Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum dengan target kinerja 66.60 Prosen
- Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas dengan indikator Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dan dengan target kinerja 45.50 Prosen

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja tahun 2022 s/d Semester 1 sebesar 56.68 % untuk capaian kinerja *Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum* dan 0.11 % untuk *Meningkatnya Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)* dan dengan realisasi anggaran Sebesar Rp.3.529.446.318 atau 17.63 %.

1.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dengan Indikator Terpenuhinya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kanupaten 10 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620,081,260.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 2 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 20 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.432.418,-

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dengan Indikator Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum 4000 Buah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12,184,454,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Buah dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0.0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.046.225.577,-

- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dengan Indikator Terpenuhinya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU) 3000 Buah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 956,382,580.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 518 Buah dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 60.37 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 314.858.000,-

1.2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Dengan Indikator Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi 3 Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199,601,400.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Lokasi dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.969.900,-

b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Dengan Indikator Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 6 Unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199,999,800.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Unit dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.180.100,-

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

Dengan Indikator Jumlah SDM Pengelola Terminal Angkutan Darat yang Profesional 30 Orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381,299,800.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 15 Orang dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 176.745.845,-

1.3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

a. Sub Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dengan Indikator Jumlah Terpenuhinya Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,705,450,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0.49 Kegiatan dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 49 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.174.100,-

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Jumlah Petugas Parkir yang dibina 580 Orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239,200,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Orang dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.784.652,-

1.4. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Tersedianya Sistem Pelayanan Jasa Angkutan 1 Sistem Aplikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49,548,700.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Sistem Aplikasi dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.117.300,-

b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek 1 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86,592,600.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1.98 Kegiatan dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 189 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

1.5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Dengan Indikator Terpenuhinya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Trayek Lintas Daerah Secara Elektronik 1 Dokumen Sistem, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49,593,600.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Dokumen Sistem dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.643.100,-

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek 1 Dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49,791,800.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Dokumen dengan tingkat persentase

pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.190.200,-

1.6. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Dengan Indikator Jumlah Kebijakan Transportasi yang Tersampaikan pada Masyarakat 2 Dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143,878,700.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.483.100,-

1.7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Dengan Indikator Tersedianya Dokumen Teknis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon 1 Dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133,064,200.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Dokumen dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.549.200,-
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Dengan Indikator Terlaksanakanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin 30 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.293.400.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 15 Kegiatan dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.793.074,-

1.8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan Indikator Terbangunya Sarana dan Prasarana Pengujian yang Layak Fungsi 4 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.995.800.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Paket dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.019.800,-

b. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan Indikator Terlaksanakanya Pengujian Kendaraan Bermotor 30240 Wajib Uji, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.957.900.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 11423 Wajib Uji dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 37.77 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.664.295,-

c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan Indikator Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Smart Card 18000 Smart Card, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539,990,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Smart Card dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 560.000,-

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan Indikator Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor 9 Jenis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210,187,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Jenis dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.262.000,-

1.9. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Dengan Terlaksananya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3 Dok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370,872,600.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Dok dengan tingkat persentase

pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.997.800,-

- b. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Keg, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102,352,600.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Keg dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

- c. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian 9 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 664,858,200.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 66.67 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 353.838.548,-

- d. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75,437,300.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 2 Kegiatan dengan tingkat persentase

pencapaian kinerja renja sebesar 33.33 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.957.300,-

1.10. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Dengan Indikator Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 12 Keg, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55,091,400.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 6 Keg dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 50 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Dengan Indikator Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 4 Keg, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,040,000.00

Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Keg dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dengan Indikator Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 6 Keg, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.952.000.00
Dinas Perhubungan telah merealisasikan Capaian Kinerja sebanyak 0 Keg dengan tingkat persentase pencapaian kinerja renja sebesar 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan semester 1 (TW II) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan telah merealisasikan anggaran Daerah sebesar Rp. 22.876.293.234,- (*dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) dari target Rp. 62.648.904.987,- (*enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 36.52 %. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022, yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Dengan rincian Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 48.423.583.507,- Dan Belanja Modal Sebesar Rp. 14.225.321.480,-.

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 Sampai dengan Semester I (TW II), sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas Perhubungan yang menangani Non urusan dan Urusan Perhubungan memiliki target kinerja dan anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR NASIONAL	PKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	-	Rasio Volume per Kapasitas (VIC Ratio)	0.75	0.73	0.72	0.7	0.75	0.75	0	0	0.72	0.7	
2	Meningkatnya kenyamanan yang berkeselamatan	-	Presentase Jumlah Kendaraan Laki Fungsional per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.89	83.05	83.24	83.44	153.99	79.66	46.37	0	120	125	
3	Meningkatnya Pelayanan Parkir yang memadai	-	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Sampai dengan Semester I (TW II) Tahun 2022 belum tercapai, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan beberapa sub. Kegiatan yang mendukung indikator sasaran berebenturan dengan prosentase waktu di anggaran kas. Adapun rincian target kinerja Sampai dengan Semester I (TW II) Tahun 2022 diukur secara pagu anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kesatu

“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas”

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.600.835.940,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.251.940.223,- atau 17.48 % dengan target kinerja sasaran sebesar 75 Prosen. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target kinerja 0 Prosen karena belum melaksanakan Survey LHR Sehingga target

yang telah ditetapkan belum bisa terealisasi.

2. Sasaran Kedua

"Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan".

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.424.130.700,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 277.506.095,- atau 19.49 % dengan target kinerja 83.24 %. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target sebesar 37.77 % dari realisasi wajib uji 11.423 dibagi 30.240 wajib uji di kali 100. Sehingga Dinas perhubungan telah mencapai target sebanyak 37.77 %.

3. Sasaran Ketiga

"Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai".

Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 sebesar 75 point. karena belum melaksanakan Survey IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Sehingga target yang telah ditetapkan belum bisa terealisasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon merupakan dinas teknis, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atau memiliki kewenangan dalam pengelolaan masalah perhubungan. Untuk menjalankan tugasnya dinas perhubungan mempunyai visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat , Tertib, Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat "

Untuk memperjelas visi sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel tersebut di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Selamat : Terkandung makna bahwa dinas perhubungan sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan, harus dapat memberikan pelayanan yang baik, terhadap trasportasi umum yang digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian kendaraan umum yang laik jalan).

Tertib : Terkandung makna sebagai dinas teknis yang memiliki Kewenangan mengatur lalu lintas, berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.

Lancar : Memiliki makna semua kegiatan trasportasi dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau terhindar dari macet.

Terpadu : Kegiatan antar Moda transportasi berjalan secara sinergi.

Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Dinas Perhubungan yang lebih tangguh guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Sebagai dinas teknis yang menangani masalah perhubungan merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tentunya memiliki harapan yang diemban oleh Dinas perhubungan dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan visi, tugas dan fungsi tersebut, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Pelayanan penerangan jalan umum di wilayah kabupaten cirebon yang belum merata, dari jumlah target 15.000 titik cahaya, baru terpasang 9.815 Titik Cahaya.
- Belum meratanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada karena luasnya wilayah Kabupaten Cirebon ± 990.36 km²
- Menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi, karena banyaknya kendaraan umum yang tidak laik jalan serta banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
Tabel 2.3
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perwatan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sektiar				Page Indikasi	Bertambah / Berkurang			
				Sebelum	Setelah	Selisih		Total Utur			Target					
								11	12	13						
1.	URUSAN PELAKUAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	3	4	A					4.707.312.611,00	4.707.312.611,00				
2.	URUSAN PELAKUAN DENGAN BIDANG PERTULUNGGAH										67.156.237.598,00	67.156.237.598,00				
2.1.1.	PROGRAM PENGURANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA										67.156.237.598,00	67.156.237.598,00				
2.1.1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA							proses	proses	proses	Persentase Penurunan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Publik	63	63			
								proses	proses	proses	Persentase Penurunan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Publik	100	100			
								proses	proses	proses	Persentase Penurunan Polyaean Administrasi Perkantoran	100	100			
								proses	proses	proses	Persentase Penurunan Dinas/Agarita	100	100			
								proses	proses	proses	Persentase Penurunan Capatan Kinerja	100	100			
								proses	proses	proses	Persentase Komitmen Program Kewirausahaan Berkelanjutan	100	100			
								proses	proses	proses	Persentase Penurunan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Publik	100	100			
2.1.1.01.2.01.	Penerapan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Dok	Dok	Dok	Tersusun Dokumen Perencanaan - Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4	4	161.335.480,00		
2.1.1.01.2.01.01.	Peraturan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersusun Dokumen Perencanaan Sektor	8	7	65.280.080,00	65.280.080,00	-			

1.1.01.01.1.01 .02.	Koordinasi dan Pengamanan Dokumen Perintah BKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Dok	Dok	Tersedia/si Dokumen BKA-SKPD	Tersedia/si Dokumen BKA-SKPD	1	2
1.1.01.01.1.01 .03.	Koordinasi dan Pengamanan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si dokumen perintah BKA-SKPD	Tersedia/si dokumen perintah BKA-SKPD	-	-	-	-
1.1.01.01.1.01 .04.	Koordinasi dan Pengamanan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si dokumen DPA-SKPD	Tersedia/si dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-
1.1.01.01.1.01 .05.	Koordinasi dan Pengamanan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si dokumen DPA-SKPD	Tersedia/si dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-
1.1.01.01.1.01 .06.	Koordinasi dan Pengamanan Laporan Ciptaan Karya dan Bilangan Bantuan Kewajib SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Laporan Ciptaan Karya dan Bilangan Bantuan Kewajib SKPD	Tersedia/si Laporan Ciptaan Karya dan Bilangan Bantuan Kewajib SKPD	-	-	-	-
2.1.1.01.01.1.01 .07.	Fasilitasi Kewajib Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Laporan Fasilitasi Kewajib Perangkat Daerah	Tersedia/si Laporan Fasilitasi Kewajib Perangkat Daerah	-	-	-	-
1.1.5.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Peningkatan Kapasitas dan Daya Aparatur Dinas	Peningkatan Kapasitas dan Daya Aparatur Dinas	1	2	9.123.411.800.00	9.123.411.800.00
1.1.1.01.1.02 .01.	Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	Pegawai	Pegawai	Jumlah Pegawai ASN yang terima Gaji dan Tunjangan serta batas Jumlah	Jumlah Pegawai ASN yang terima Gaji dan Tunjangan serta batas Jumlah	66	67	9.045.925.200.00	9.045.925.200.00
2.1.3.01.01.1.02 .02.	Revisi dan Administrasi Pelepasan Tiga ASN	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si administrasi pelepasan tiga ASN	Tersedia/si administrasi pelepasan tiga ASN	-	-	-	-
2.1.1.01.01.1.02 .03.	Pelaksanaan Perintah dalam Perjalanan Nama Rencana SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Perintah dalam Perjalanan Nama Rencana SKPD	Tersedia/si Perintah dalam Perjalanan Nama Rencana SKPD	-	-	-	-
2.1.3.01.01.1.03 .04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Abuansi SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Pelaksanaan Abuansi SKPD	Tersedia/si Pelaksanaan Abuansi SKPD	-	-	-	-
2.1.4.01.01.1.02 .05.	Koordinasi dan Pengamanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akhir	Tersedia/si Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akhir	-	-	17.874.600.00	17.874.600.00
2.1.5.01.01.1.02 .06.	Pengisian dan Pengamanan Tanggapan Perencanaan	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Pengisian dan Pengamanan Tanggapan Perencanaan	Tersedia/si Pengisian dan Pengamanan Tanggapan Perencanaan	-	-	-	-
2.1.1.01.01.1.02 .07.	Koordinasi dan Pengamanan Laporan Keuangan Bilangan Transaksi Semestera SKPD	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Laporan Keuangan Periode	Tersedia/si Laporan Keuangan Periode	3	2	39.712.000.00	39.712.000.00
2.1.5.01.01.1.02 .08.	Pengisian dan Analisis Program Rrahmasi Anggaran	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Tersedia/si Pengisian Program Rrahmasi Anggaran	Tersedia/si Pengisian Program Rrahmasi Anggaran	1	1	-	-

2.15.01.3.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat:					Dok	Dok		Terdakwa Administrasi Barang Milik Daerah		2	2	2	
2.15.01.3.03.01.	Perusakan Inventaris Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Krig		Terhadanya Inventaris Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.02.	Penyelesaian Barang Milik Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Krig		Terhadanya Pengembalian Barang Milik Daerah SKPD.		12	12	12	12	
2.15.01.3.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.04.	Penilaian, Pengawas, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Ringatan Pekerjaan Pengawas dan Pengendalian BMD		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.05.	Rakreksial dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Krig			Terhadanya Rakreksial dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.06.	Pencairanan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terpusatnya Pencairanan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.07.	Penilaian Barang Milik Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.08.	Perencanaan Pengelolaan Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.09.	Analisa dan Pengembangan Rantau Daerah, serta Penyelesaian Masalah Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Krig		Analisa dan Pengembangan Rantau Daerah, serta Penyelesaian Masalah Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.10.	Penyaluran dan Penyalihgunaan Kekayaan Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Krig			Terhadanya Penyaluran dan Penyalihgunaan Kekayaan Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.11.	Penilaian dan Penilaian Kekayaan Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Dokumen Penilaian dan Penilaian Kekayaan Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.12.	Pembangunan dan Perekonomian Ciptakan Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Dokumen Pembangunan dan Perekonomian Ciptakan Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.13.	Penilaian Data Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Terhadanya Pengolahan Data Rantau Daerah		1	1	1	1	
2.15.01.3.03.14.	Penitipan Wajib Rantau Daerah		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok		Penitipan Wajib Rantau Daerah		1	1	1	1	

		Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	Terdilansir Dokumen Pelaporan Pengabdian Riset dan Dicatat	Terdilansir Dokumen Pelaporan Pengabdian Riset dan Dicatat
		Kabupaten Cirebon	kegiatan	kegiatan	Pemerintah Administrasi Kepengawilan	Pemerintah Administrasi Kepengawilan
2.1.3.01.01.1.04 .07.	Pelaporan Pengabdian Riset dan Dicatat	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	173.472.050,00	173.472.050,00
2.1.3.01.01.2.05.	Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.		
2.1.3.01.01.2.05. .01.	Perangkat Sistem dan Proses dan Organisasi Pengabdian	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis		
2.1.3.01.01.2.05. .02.	Pengabdian Pelaku Olah Bantuan Aturan Kolektif-Spasial	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	111.472.000,00	111.472.000,00
2.1.3.01.01.2.05. .03.	Pembatasan dan Pengabdian Administrasi Kependidikan	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.		
2.1.3.01.01.2.05. .04.	Koordinasi dan Poldikmas Sistem Informasi Kepengawilan	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.		
2.1.3.01.01.2.05. .05.	Pelatihan, Evaluasi dan Pendampingan Kinerja Pengabdian	Kabupaten Cirebon	Kegiatan	Kegiatan	Terlaksana Koordinasi dan Indeksma Sistem Informasi Kepengawilan	Terlaksana Koordinasi dan Indeksma Sistem Informasi Kepengawilan
2.1.3.01.01.2.05. .06.	Pelatihan dan Pelatihan Pengabdian Sosial dan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Cirebon	Orang	Orang	Terlaksana Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Kinerja Pengabdian	Terlaksana Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Kinerja Pengabdian
2.1.3.01.01.2.05. .07.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Kegiatan	Kegiatan	Terlaksana Pendekatan Beritaskasi Tujuan dan Fungsi	Terlaksana Pendekatan Beritaskasi Tujuan dan Fungsi
2.1.3.01.01.2.05. .08.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Kegiatan	Kegiatan	Terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2.1.3.01.01.2.05. .09.	Sosialisasi Tujuan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Kegiatan	Kegiatan	Terlaksana Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2.1.3.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instansi Lokal di Peranggitan	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instansi Lokal di Peranggitan
2.1.3.01.01.2.06. .01.	Persiapan Komponen Instansi Lurah/Pemerintahan Basang Kuning	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instansi Lokal di Peranggitan	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instansi Lokal di Peranggitan
2.1.3.01.01.2.06. .02.	Persiapan Perilaku dan Peranggitan Kuning	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis	Terpenuhi Kebutuhan Perilaku dan Peranggitan	Terpenuhi Kebutuhan Perilaku dan Peranggitan
2.1.3.01.01.2.06. .03.	Perencahan Basang Cirebon dan Pengabdian	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis	Terpenuhi Kebutuhan Cetakan dan Pengabdian	Terpenuhi Kebutuhan Cetakan dan Pengabdian
2.1.3.01.01.2.06. .04.	Perencahan Bahan Bahan dan Peranggitan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Jenis	Jenis	Terpenuhi Bahan Bahan dan Peranggitan Perundang-undangan	Terpenuhi Bahan Bahan dan Peranggitan Perundang-undangan

2.15.01.01.2.08 .03.	Pembelahan Jasa Perdagian dan Pemasaran Kantor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Obeng	Obeng	Terpenilainya Jasa Pemasaran dan Pemasangan Klaten	Terpenilainya Jasa Pemasaran dan Pemasangan Kantor	10	10	-
2.15.01.01.2.08 .04.	Pembelahan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Obeng	Obeng	Terpenilainya Jasa Pemasaran Umum Kantor	Terpenilainya Jasa Pemasaran Umum Kantor	10	10	-
2.15.01.2.08. 1.15.01.2.08.	Pembelahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kiglatan	Kiglatan	Terpenilainya Pemasaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenilainya Pemasaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	158,369,595,00
2.15.01.01.2.09 .01.	Pembelahan Jasa Penitikanan, Biaya Pemeliharaan dan Paket Kerja dan Penerangan Dinas atau Kendaraan Dinas / jasa Operasional	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	unit	unit	Terpenilainya Pembelahan Rata / Biaya Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenilainya Pembelahan Rata / Biaya Kendaraan Dinas / Operasional	16	16	114,342,000,00
2.15.01.01.2.09 .02.	Pembelahan Jasa Penitikanan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Penerangan Dinas atau Lengkap Operasional atau Lengkap	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Unit	Unit	Terpenilainya Jasa Pembelahan Pengadaan KIT dan STNK	Terpenilainya Jasa Pembelahan Pengadaan KIT dan STNK	18	18	41,391,200,00
2.15.01.01.2.09 .03.	Pembelahan Paket	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Unit	Unit	Terpenilainya Pembelahan Paket	Terpenilainya Pembelahan Paket	10	10	-
2.15.01.01.2.09 .04.	Pembelahan Pemasaran dan Pemasaran Lainnya	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Unit	Unit	Terpenilainya Pembelahan dan Pemasaran Lainnya	Terpenilainya Pembelahan dan Pemasaran Lainnya	10	10	-
2.15.01.01.2.09 .05.	Pembelahan Pemasaran dan Pemasaran Lainnya	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Gedung	Gedung	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor	10	10	159,345,595,00
2.15.01.01.2.09 .06.	Pembelahan Pemasaran dan Pemasaran Lainnya	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Unit	Unit	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	49,750,000,00
2.15.01.01.2.09 .07.	Pembelahan Pemasaran dan Pemasaran Lainnya	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Halter	Halter	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenilainya Pembelahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5000	5000	-
2.15.01.01.2.09 .12.	Pembelahan Pemasaran dan Pemasaran Lainnya	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Proses	Proses	Peningkatan Proses	Peningkatan Proses	15	15	-
2.15.01. 1.15.01.	PROGRAM PENINGKATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							Peningkatan Keterwujudan Praktisasi dan Pajitna serta tatakelola teknologi pertumbuhan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	Peningkatan Keterwujudan Praktisasi dan Pajitna serta tatakelola teknologi pertumbuhan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)			-
								Rasio tarif dan Pemasaran Angkutan yang tinggi	Rasio tarif dan Pemasaran Angkutan yang tinggi	60	60	-

1.1.02.02.2.03 .04	Rahabilitasi dan Penetapanan Perbaikan Jalan	Kabupaten Cirebon	Batu	Batu	Terpadatnya Infrastruktur dan Pemukiman Perbaikan Jalan (PJI)	1.000	3.000	256.382.580,00	1.94.310.580,00	1.860.000.000,00
1.1.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Unit	Terpadatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pendukungnya	1	1	760.000,00	760.000,00	
2.1.02.02.2.03 .01	Pembangunan Pendukungan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Cirebon	rekam	rekam	Terhadanya Pengelolaan Dokumen Perancangan Penitigan Terminal Penumpang Tipe C	2	2			
2.1.02.02.2.03 .02	Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Cirebon	Gedung	Gedung	Terhadanya Gedung Terminal di Kabupaten Cirebon	1	1			
2.1.02.02.2.03 .03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Cirebon	Lahan	Lahan	Terhadanya lahan bkt. lah BRT, tgl	10	10	194.501.400,00	198.601.400,00	
2.1.02.02.2.03 .04	Rahabilitasi dan Peningkatan Terminal (fasilitas Umum dan Penyeberang)	Kabupaten Cirebon	Unit	Unit	Terhadanya Rehabilitasi dan Peningkatan Terminal (fasilitas Umum dan Penyeberang)	10	10	191.993.200,00	195.993.200,00	
2.1.02.02.2.03 .05	Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Terminal Tipe C	Kabupaten Cirebon	unit	unit	Jumlah SDR pengelola Terminal Agenzia Dari yang praktis	10	10	381.299.800,00	381.299.800,00	
2.1.02.2.04	Pembangunan Jalan Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Perker	Kab Cirebon	kgm	kgm	Terhadanya Taman parkir dan Penyeberangan perker	2	2	1.844.50.000,00	2.145.700.000,00	290.550.000,00
2.1.02.2.04 .01	Fasilitasi penyeberangan Perker dan Perker dengan Fasilitas Kemudahan Keseharian dan Sistem Pelajaran Perkeran Berdasarkan teknologi Elektronik	Kab Cirebon	kgm	kgm	Terpadatnya Perkeran dan Perker dengan Fasilitas Keseharian Kota dalam Sistem Pelajaran Berdasarkan teknologi Elektronik	1	1	1.705.450.000,00	1.904.000.000,00	200.550.000,00

2.1.3.03.02.1.04 .02.	Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Para Kewarganegaraan Kalippondok/Orsi						Craig	Craig	Jumlah Pengguna Paket yang dibeli	Jumlah Pengguna Paket yang dibeli	238.200.000,00
2.1.5.02.1.05.	Pengelolaan Berkala Kondisian Bermentor						Unit	Kondisian Wajib Uji yang Mengandalkan Smart Card / Sertifikat Pengajar	Kondisian Wajib Uji yang Mengandalkan Smart Card / Sertifikat Pengajar	18000	1.424.130.700,00
2.1.3.02.02.1.05 .02.	Penerapan Sistem dan Prasaran Pengelolaan Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	ptkns	ptkns	Terintegrasi Sistma dan Prasaran Pengelolaan Yang Lengkap	Terintegrasi Sistma dan Prasaran Pengelolaan Yang Lengkap	3	3	176.995.890,00	176.995.890,00
2.1.3.02.02.1.05 .02.	Pengelolaan Kependidikan Sekolah Dasar Hentri Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Org	Org	Terdiksiaranya Pelatihan Pengajar	Terdiksiaranya Pelatihan Pengajar	10	10	-	-
2.1.5.02.02.1.05 .02.	Rigifitasi Kondisian Wajib Uji Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Wajib Uji	Wajib Uji	Terdiksiaranya Pengajaran Kondisian Bermentor	Terdiksiaranya Pengajaran Kondisian Bermentor	30340	30340	416.917.900,00	416.917.900,00
2.1.1.02.02.1.05 .02.	Penerapan Buku Luka Uji Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Smart Card	Smart Card	Terdiksiaranya Buku Luka Uji Pengelola Berkala Kondisian Bermentor dalam Bentuk Smart Card	Terdiksiaranya Buku Luka Uji Pengelola Berkala Kondisian Bermentor dalam Bentuk Smart Card	18	18	119.946.000,00	119.946.000,00
2.1.1.02.02.1.05 .02.	Strukturan Standar Operasional Prosesur Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kag	Kag	Terdiksiaranya Sosialisasi Bag Peraturan Anggaran / Banting	Terdiksiaranya Sosialisasi Bag Peraturan Anggaran / Banting	20	20	-	-
2.1.1.02.02.1.05 .02.	Identifikasi dan Analisis Rancana Wajib Uji Jumlah Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dik	Dik	Terdiksiaranya Data Potensi Kondisian Wajib Uji	Terdiksiaranya Data Potensi Kondisian Wajib Uji	1	1	-	-
2.1.5.02.02.2.05 .02.	Penerapan Sistma dan Prasaran Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	ptkns	ptkns	Terpeliharaanya sistem pengelolaan kondisian bermentor	Terpeliharaanya sistem pengelolaan kondisian bermentor	9	9	110.187.000,00	110.187.000,00
2.1.5.02.02.2.05 .02.	Koordinasi Pengelolaan Pengelolaan Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kag	Kag	Terdiksiaranya Koordinasi Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Terdiksiaranya Koordinasi Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	4	4	-	-
2.1.5.02.02.2.05 .02.	Penerapan Tali Ketraksaan Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dik	Dik	Terdiksiaranya Prinsip Tali Ketraksaan	Terdiksiaranya Prinsip Tali Ketraksaan	1	1	-	-
2.1.5.02.02.2.05 .02.	Hukumering dan Etikisme Pengelolaan Pengelola Berkala Kondisian Bermentor	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dik	Dik	Terdiksiaranya Dokumen Etikisme	Terdiksiaranya Dokumen Etikisme	-	-	-	-

1.15.02.2.06.	Pelaksanaan Pengembangan dan Riset Kajian Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota			Kendaraan	Konstruksi	Jumlah Pelanggaran Anggaran Penumpang dan Barang dalam Berkela Lintas	Jumlah Pelanggaran Anggaran Penumpang dan Barang dalam Berkela Lintas	18.456.836,00
1.15.02.01.2.06 .01.	Penitikan Pihak Dalam dan Pihakluar Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dikti	Terkaitanya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Terkaitanya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1.233.171.534,00
1.15.02.01.2.06 .02.	Pengelolaan, Peremangko, Perbaikan dan Pemeliharaan Pengelegakan jalan dalam rangka Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kep	Terjangan dan terpalangnya buatan jalan dalam rangka Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas	Terjangan dan terpalangnya buatan jalan dalam rangka Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas	370.872.000,00
1.15.02.01.2.06 .03.	Uji Coba dan Simulasi Pelaksanaan Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kep	Terkaitanya Uji Coba dan Simulasi Pelaksanaan Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Terkaitanya Uji Coba dan Simulasi Pelaksanaan Mengamankan dan Elkayata Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten Kota	103.352.000,00
1.15.02.01.2.06 .04.	Pengaman dan Pengamanan Elektornik Pakaianan Tembakau untuk jalan Kabupaten Kota		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepustakaan	Terkaitanya Pengamanan dan Pengamanan Penggunaan dan Pengambilan	Terkaitanya Pengamanan dan Pengambilan	683.599.056,00
1.15.02.01.2.06 .05.	Instrum Lalu Lintas dan Anggaran Jalan Komparasional		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepustakaan	terkaitanya lalu lintas dan anggaran jalan	terkaitanya lalu lintas dan anggaran jalan	18.50.000,00
1.15.02.01.2.07.	Penerjauhan Hasil Analisis Daerah Lalu Lintas (Analisis) untuk jalan Kabupaten Kota			Dikti	Dikti	Jumlah Dokumen analisis yang di setujui dan dikemasukan dengan baik	Jumlah Dokumen analisis yang di setujui dan dikemasukan dengan baik	374.357.400,00
1.15.02.01.2.07 .01.	Penerjauhan Kajian Tra.Kelela Analisis		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dikti	Terkaitanya Dokumen Teknis Penilaian Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon	Terkaitanya Dokumen Teknis Penilaian Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon	131.064.200,00
1.15.02.01.2.07 .02.	Penggunaan Raport Penilaian Analisis		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Orang	Jumlah Berita Acara yang protokolasi	Jumlah Berita Acara yang protokolasi	131.064.200,00
1.15.02.01.2.07 .03.	Koordinasi dan Sistematisasi Penilaian Hasil Analisis		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepustakaan	Terkaitanya Koordinasi dan Sistematisasi Penilaian Analisis	Terkaitanya Koordinasi dan Sistematisasi Penilaian Analisis	241.294.400,00
1.15.02.01.2.07 .04.	Pengembangan Pakaianan Holomen dan Analisis		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepustakaan	Terkaitanya Pengamanan Pakaianan Analisis	Terkaitanya Pengamanan Pakaianan Analisis	241.294.400,00
1.15.02.01.2.08.	Audit dan Impak Kesehatan LIAJ di jalan			Kepustakaan	Kepustakaan	Terkaitanya Audit dan Impak	Terkaitanya Audit dan Impak	140.083.400,00
1.15.02.01.2.08 .01.	Pengembangan Kajian Audit dan Inspektor LIAJ		Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Orang	Terkaitanya Pengamanan Kajian Audit dan Impak LIAJ	Terkaitanya Pengamanan Kajian Audit dan Impak LIAJ	140.083.400,00

2.1.5.02.01.1.08 .03.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaian Uji Pekatuan Uji Berdasarkan Kompetensi	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Uji Berdasarkan Kompetensi	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Uji Berdasarkan Kompetensi	(2)	33.591.400,00					
2.1.5.02.01.2.08 .03.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaian Terminal	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Terminal	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Terminal	(4)	-					
2.1.5.02.02.1.06 .04.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaian Penilaian Pengembangan Kompetensi Perguruan Tinggi Berdasarkan Klasifikasi Sosia	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Pengembangan Kompetensi Perguruan Tinggi Berdasarkan Klasifikasi Kota	Terkaitan Pengembangan Kompetensi Perguruan Tinggi Berdasarkan Klasifikasi Kota	(4)	45.040.000,00					
2.1.5.02.02.2.09 .05.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaian Sistem Manajemen Kualitas dan Penilaian Anggaran Universitas	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Sistem Manajemen Kualitas dan Penilaian Anggaran Universitas	Terkaitan Inspeksi, Audit dan Penilaian Sistem Manajemen Kualitas dan Penilaian Anggaran Universitas	(6)	46.912.000,00					
2.1.5.02.2.09.	Pengelolaan Anggaran Luarum untuk jasa Angkutan Orang dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Dikti	Pemerintahan Pengelolaan dalam Perjalanan Anggaran	(60)	136.147.300,00
2.1.5.02.02.3.09 .01.	Pengelolaan dan Pengembangan Keterpaduan Anggaran Umum untuk Jasa Angkutan Orang dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Sistem Pengelolaan Anggaran	Terkaitan Sistem Pengelolaan Anggaran	(1)	49.548.700,00					
2.1.5.02.03.1.09 .01.	Pengembangan dan Pengembangan Keterpaduan Anggaran Umum untuk Jasa Angkutan Orang dalam I (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terkaitan Kordinasi dan Monitoring dan Trippel	Terkaitan Kordinasi dan Monitoring dan Trippel	(4)	86.592.600,00					
2.1.5.02.03.2.10 .01.	Pembentukan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Perekonomian dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terdakwa Dokumen Pembentukan Kewirausahaan Perekonomian dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Terdakwa Dokumen Pembentukan Kewirausahaan Perekonomian dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	(1)	-					
2.1.5.02.03.2.10	Sensitasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terkaitan sosial dan ekonomi kota/kabupaten dan pengembangan kewirausahaan	Terkaitan sosial dan ekonomi kota/kabupaten dan pengembangan kewirausahaan	(1)	-					

3.1.3.02.02.1.1 01.	Pelaksanaan Perencanaan Rencana Umum Jaringan Transportasi dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	Tersampaikan pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten	-
3.1.5.02.02.1.12 01.	Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	Tersediaanya Dokumen Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan	Tersediaanya dokumen pembangunan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten
3.1.5.02.02.1.12 01.	Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepala Kabupaten Cirebon	Kepala Kabupaten Cirebon	Tersediaanya Dokumen Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan	Tersediaanya dokumen pembangunan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten
3.1.5.02.02.1.13 02.	Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kepala Kabupaten Cirebon	Kepala Kabupaten Cirebon	Tersediaanya Dokumen Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan	Tersediaanya dokumen pembangunan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten
3.1.5.02.02.1.14 01.	Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	Tersediaanya Dokumen Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan	Tersediaanya dokumen pembangunan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten
3.1.5.02.02.1.14 02.	Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dokumen System	Dokumen System	Tersediaanya Dokumen Pembangunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Pedesaan	Tersediaanya dokumen pembangunan rencana umum jaringan transportasi dalam I (satu) kabupaten
3.1.5.02.02.1.14 03.	Koordinasi dan kolaborasi pengembangan jaringan Angkutan Orang dalam Transportasi Kewilayahan Kabupaten/Kota dalam sistem pelaporan perjalanan berbasis teknologi informasi elektronik	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok.	Dok.	Tersediaanya Pengembangan jaringan Angkutan Orang dalam Transportasi Kewilayahan Kabupaten/Kota	Tersediaanya Pengembangan jaringan Angkutan Orang dalam Transportasi Kewilayahan Kabupaten/Kota
3.1.5.02.02.1.16	Pembangunan Tarif Kotas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melalui Transportasi serupa Angkutan Orang serta Angkutan Perkotaan dan Perkebunan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Dok.	Dok.	Tersampaikan Pembangunan Tarif Kota Ekonomi untuk Angkutan Orang	Tersampaikan Pembangunan Tarif Kota Ekonomi untuk Angkutan Orang

2.15.02.02.2.16 .01.	Audit Tarif Kotas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perluas dalam Perluas dalam Perluas dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kigisan	Kigisan	Terdakwa menyatakan bahwa tarif kota ekonomi angkutan orang	Terdakwa menyatakan bahwa tarif kota ekonomi angkutan orang
2.15.02.02.2.16 .02.	Pengelolaan dan Pengontrolan Tarif Kotas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perluas dalam Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kigisan	Kigisan	Terdakwa menyatakan pengelolaan dan pengontrolan tarif	Terdakwa menyatakan pengelolaan dan pengontrolan tarif
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Proses	Proses	Heningkotanya menyatakan permenaraan pelabuhan	Heningkotanya menyatakan permenaraan pelabuhan
2.15.03.2.01.	Pembentukan Lembaga Angkutan Laut Pelajur Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan Usaha yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Dok	Dok	Tersediaanya Dokumen dan Aplikasi pelaporan peritama usaha secara elektronik	Tersediaanya Dokumen dan Aplikasi pelaporan peritama usaha secara elektronik
2.15.03.2.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Angkutan Laut Pelajur Rakyat Kamarudin Kamaruddin dalam Satuan Pelajaran Perintinan Beranda Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Aplikasi	Aplikasi	Terdakwa menyatakan Dokumen dan Aplikasi pelaporan peritama usaha secara elektronik	Terdakwa menyatakan Dokumen dan Aplikasi pelaporan peritama usaha secara elektronik
2.15.03.2.03 .02.	Koordinasi dan Sirkuitasi Pengelolaan Pelabuhan dan Laut Angkutan Laut Pelajur Rakyat Kamaruddin Kamaruddin	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	bog	bog	terdakwa menyatakan koordinasi dan sirkuitasi pengelolaan pelabuhan dan Laut Angkutan Laut Pelajur Rakyat Kamaruddin Kamaruddin	terdakwa menyatakan koordinasi dan sirkuitasi pengelolaan pelabuhan dan Laut Angkutan Laut Pelajur Rakyat Kamaruddin Kamaruddin
2.15.03.2.08	Penerbitan Surat Usaha Jasa Terwakil dengan Perantaraan dan Perbaikan Kapal			Dok	Dok	Tersediaanya Dokumen Pelajaran Perintinan Usaha Perantaraan dan Perbaikan kapal secara elektronik	Tersediaanya Dokumen Pelajaran Perintinan Usaha Perantaraan dan Perbaikan kapal secara elektronik
2.15.03.2.09 .01.	Fasilitasi Penerjemah Persebaran Perintinan dan Usaha Jasa Terwakil Dengan Perintinan dan Perbaikan Kapal dalam Situasi Pelajaran Perintinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Dok	Dok	Terdakwa menyatakan Aplikasi pelajaran Perintinan terwakil Perintinan dan Perbaikan Kapal secara elektronik	Terdakwa menyatakan Aplikasi pelajaran Perintinan terwakil Perintinan dan Perbaikan Kapal secara elektronik

115.03.03.1.06 .00.	Koordinasi dan Subsistem Pengembangan Mekanisme Untuk Jasa Terbatas, Dengan Perandara dan Perbaikan Kapasit		Kabupaten Cirebon	Dokumen legislatif	Dokumen legislatif	Tarif/tarifan Pengembangan Politikam Pengembangan dan Perbaikan Kapasit			
------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten Cirebon tahun 2021 yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa program kegiatan masyarakat yang diusulkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dalam Pagu Indikatif Kewilayahahan (PIK) sebagian besar berupa usulan pemasang penerangan jalan umum (PJU) yang memang belum terpasang dibeberapa titik yang ada diwilayah Kabupaten Cirebon.

Adapun dana Pagu Indikatif Kewilayahahan (PIK) Tahun 2022 berasal dari dana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebesar **Rp.9.913.000.000,-** Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Batasan / Volume	Catatan
1	Desripsi: Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang 68 titik x Rp. 8.500.000,- = Rp. 578.000.000,-; Jenis Belanja: Usuran/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan/Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. penyedian Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Desripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kecamatan Babakan; Jenis Belanja: Usuran/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyedian/Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. penyedian Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Desripsi: Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang; Jenis Belanja: Usuran/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyedian/Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. Penyedian Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Desripsi: Pemasangan PJU jalan Kabupaten rus jalan Babakan sari - bojongnaga (tidak pakai tiang); Jenis Belanja: Usuran/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyedian Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. Penyedian Prolengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Desripsi: PJU dengan tiang penyangga Desa Sintang Mekar; Jenis Belanja: Usuran/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	3	Terpasirnya Penerangan Jalan Umum	4 68 unit	Pengusul (09-02-2021): (PJU) Tanpa Tiang 68 titik x Rp. 8.500.000,- = Rp. 578.000.000,-; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bspak / Ibu ayahun memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 65 Titik tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titk. Rp. 8.500.000,- Terimakasih; TAPO Perencana:
2	Desripsi: Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tanpa Tiang di DESA DI KEcamatan BABAKAN Kecamatan: KECAMATAN BABAKAN Desa:	Terpasirnya Penerangan Jalan Umum	76 UNIT	Pengusul (24-02-2021): Waatalkumussalam, Wr.Wib usulan Pemasangan PJU di wilayah Kec. Babakan pemasangan PJU menggunakan tiang, mohon untuk di validasi; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum.... Mohon penjelasan untuk spesifikasi unitan PJU, PJU pakai tiang atau PJU tidak pakai tiang, terimakasih; TAPO Perencana (15-03-2021):	
3	Desripsi: Kecamatan Lamongan Kecamatan: KECAMATAN JAMBANG Desa:	Terpasirnya Penerangan Jalan Umum	8 Unit	Pengusul (01-03-2021): Oké melalih atas Vandanya...; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bspak / Ibu ayahun memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 8 Titik tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titk. Rp. 8.500.000,- Terimakasih; TAPO Perencana:	
4	Desripsi: Rusas (1): Prayangan DN, Cirebon - Losari km 25,3) utd. Bojongnaga (jln: Ciledug - Losari, (J.D.J.Pantai) km 72,2); Kecamatan: KECAMATAN PAREDAN Desa:	Terpasirnya Penerangan Jalan Umum	16 titik	Pengusul (24-02-2021): Sudah diperbarui; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Mohon penjelasan untuk spesifikasi unitan PJU, PJU pakai tiang atau PJU tidak pakai tiang, terimakasih; TAPO Perencana (15-03-2021):	
5	Desripsi: Jln manggala, rusas sindang jawa-sindang mekar pangkal/jn umber-bts majalengha/cirebon, rtk	Terpasirnya Penerangan Jalan Umum	10 unit	Pengusul (22-02-2021); SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bspak / Ibu ayahun memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum	

ANGGUTAN JALAN (LAJ)

Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

LUNG KENANGGA-WARUKULAWUNG, INI RAYA

bunut sindangmekar-cikdeduk, jln
cheduk-warujaya, jln cipinang
sindangmekar,jln jambang-cikdeduk.
jln sindangmekar-sindang jawi
Kecamatan: KECAMATAN
DUKUPUNTANG
Desa: SINDANGMEKAR

Lokasi: Jln dukupuntang giringata, jln
kepul ujung (ln kedongdong
Kecamatan: KECAMATAN
DUKUPUNTANG
Desa: KEDONGDONG KIDUL

Destripsi: PIU dengan Sang penjaga Desa kedongdong;
Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;
Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGGUTAN JALAN (LAJ);
Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

Destripsi: Pengadaan dan pemaksangan pererangan jalan umum (PIU)
(Pererangan jalan perbatasan antar Kecamatan / Kota, Antar
Kecamatan, dan Antar Desa (tidak Pakai Tang);
Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;
Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGGUTAN JALAN (LAJ);
Kegiatan: 2.02. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

Destripsi: PIU tanpa tang di jalan kabupaten
1. PEGANGGRAHAM (K. PLUMBON-PANGKALAN)
2. GOMBANG (K. KARANGMULYA-MARKANEEN)
3. KARANGMULYA (K. KARANGMULYA-MARKANGEN)
4. KEBAREPAN (K. KEBAREPAN-PURBAWANANGUN)
5. KARANGASEM (K. KARANGMULYA-KETUNGGANA)
6. MARKANGEN (K. MEGU-LURAH)
7. BODELOH (K. MEGU-LURAH)
8. BODESARI (K. MARANGOMOLY-A.RODESA)
9. KEDUNGSSANA (K. KARANGMULYA-KEDUNGSSANA)
10. PURBAWANANGUN (K. KEBAREPAN-PURBAWANANGUN)
11. CEMPAKA (K. TUKMUDIL-LURAH)
12. PAMUJAHAN (K. TUKMUDIL-LURAH)
13. PLUMBON (K. PLUMBON-PANGKALAN)

(PA) 10 Titik dengan tang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-.

Tertimbalkah;

TAPD Perencana (08-03-2021): Phak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kep.16-PJPU/2020 tentang Penetapan Status Rusas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rusas jalan bukan jalan lingkungan atau kewenangan Dishub; Pastikan rusas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk penganggaran PIUya;
Pengusul (22-02-2021);

SKPD Teknik (12-03-2021): Asalamualaikum... Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan pererangan jalan umum (PIU) 8 Titik dengan tang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih;
TAPD Perencana (08-03-2021): Phak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten tempat lokasi pemasangan PIU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kep.16-PJPU/2020 tentang Penetapan Status Rusas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rusas jalan kabupaten atau jalan lingkungan atau kewenangan Dishub; Pastikan rusas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk penganggaran PIUya;

Pengusul (01-03-2021): Sudah ditambahkan tidak pakai tiang mbar;
SKPD Teknik (12-03-2021): Asalamualaikum... Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan 1 (satu);
PIU/32 Titik tidak menggunakan tiang di jalan kabupaten, dengan RAB pemasangan 1 (satu);
TAPD Perencana (08-03-2021): Phak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kep.16-PJPU/2020 tentang Penetapan Status Rusas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rusas jalan kabupaten atau jalan lingkungan atau kewenangan Dishub; Pastikan rusas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk penganggaran PIUya;
Pengusul (12-03-2021);

SKPD Teknik (12-03-2021): Asalamualaikum... Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan pererangan jalan umum (PIU) 52 Titik tanpa tang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- Terimakasih;
TAPD Perencana (08-03-2021): Phak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten tempat lokasi pemasangan PIU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kep.16-PJPU/2020 tentang Penetapan Status Rusas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rusas jalan kabupaten atau jalan lingkungan atau kewenangan Dishub; Pastikan rusas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk penganggaran PIUya;

8 Lokasi: desa-desa se kecamatan
plumbon
Kecamatan: KECAMATAN PLUMBON
Desa:
Terpenuhinya
Penerangan jalan
Umum

9. KEDUNGSSANA (K. KARANGMULYA-KEDUNGSSANA)
10. PURBAWANANGUN (K. KEBAREPAN-PURBAWANANGUN)
11. CEMPaka (K. TUKMUDIL-LURAH)
12. PAMUJAHAN (K. TUKMUDIL-LURAH)
13. PLUMBON (K. PLUMBON-PANGKALAN)

8 Titik
52 unit

14. LURAH (K.K. URAH-KENANGA),

Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;

Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LJA);

Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten:

Diskripsi: Lampu Penarangan jalan Umum dengan tiang di jalan kabupaten

1. PLUMBON (K. PLUMBON-KENANGA/ALUN-ALUN)

2. DANAMULYA (K. KEDUNGSEANA-PANGKALAN);

Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;

Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJA);

Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Diskripsi: Kaca Cembung

1. KABANGIMULYA (K. KARANGMULYA-MARHANGEN)

2. PURSAWINANGUN (K. KERASEPAN-PURSAWANANGUN);

Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;

Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJA);

Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan: 01. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Diskripsi: Pengadaan Penarangan Jalan Umum;

Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD;

Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LJA);

Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota;

9	Lokasi: alun-alun kecamatan 4, dan rumah 8 Kecamatan: KECAMATAN PLUMBON Desa: Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJA); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Terpenutuhnya Penarangan Jalan Umum	12 unit	Pengusul (12-03-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penarangan jalan umum (PLJ) yang Bapak / Ibu aguh memenuhi RAS pemdasangan penarangan jalan umum (PLJ) 12 Titik dengan tiang, dengan RAS pemdasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-. Terimakasih; TAuD Perencana (09-03-2021): Phak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten tempat lokasi pemdasangan PLJ dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Name ruas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbt No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pemdasangan PLJnya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau Kecamatan untuk penganggaran PLJnya; Pengusul (12-03-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): dengan format kerangsiembung bisa dirubah nama ruas jalan kabupaten prasarana ...Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan Cermik Cembung (Kaca Cembung) yang Bapak / Ibu aguh memenuhi RAS pemdasangan 4 Unit Cermik Cembung (Kaca Cembung), dengan RAS pemdasangan 3 (satu) titik Rp. 4.500.000,-. Terimakasih;
10	Lokasi: Karangmulya 2, purbewinegun 2 Kecamatan: KECAMATAN PLUMBON Desa: Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJA); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Terpenutuhnya Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten	4 unit	Pengusul (12-03-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): dengan format kerangsiembung bisa dirubah nama ruas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbt No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pemdasangan PLJnya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau Kecamatan untuk penganggaran PLJnya; Pengusul (25-02-2021): Pasawahan 7 unit, Sampit 7 unit, Susukan Tongon 7 unit, Susukan Agung 7 unit, Kaligawe Wetan 6 unit (1 unit per tiang) Karangmulya 7 unit; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penarangan jalan umum (PLJ) yang Bapak / Ibu aguh memenuhi RAS pemdasangan penarangan jalan umum (PLJ) 46 Titik tidak menggunakan tiang, dengan RAS pemdasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- dan memenuhi RAS pemdasangan penarangan jalan umum (PLJ) 1 Titik dengan tiang, dengan RAS pemdasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-. Terimakasih;
11	Lokasi: Pasawahan, Sampit, Susukan Tonggo, Susukan Agung, Kaligawe Wetan, Kaligawe, Karangmangu Kecamatan: KECAMATAN SUSUKANLEBAK Desa: Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LJA); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Terpenutuhnya Penarangan Jalan Umum	47 Unit	TAuD Perencana (15-03-2021): ubi plu dengan tiang per unit sebesar Rp. 11.500.000,-;

12	Dekripsi: Pemasangan Lamsu Jalan Umum di ruas jalan Lalu Lintas Cirebon yang merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; Untuk 12 Desa se-Kecamatan Waled (@ Desa = 2 Triliun) TIASO, Harga satuan: Rp. 8.500.000,-/Triliun; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas (3): Gedongter (Km. Cirebon - Losari (km 22) s.d. Waled (P. Cicendig - Losari (Jl.D.I.Panjaitan) km 66,3); Kecamatan: KECAMATAN WALED Desa:	Terpenlehnya Penerangan Jalan Umum	24 Triliun	Pengusul [02-03-2021]: Mantap... Oya, Status Usulan Belum "Disetujui/Diterima" ... Hatur muhuri; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB permisangan penerangan jalan umum (PJU) 24 Triliun tanpa tiang, dengan RAB permisangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:
13	Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Dekripsi: PjU tanpa tiang di jalan poros desa (9 Desa); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas (115): Meguclik (Km. Meguclik - Kertawati) s.d. Watubelah (Jl. Watubelah - Kertawati) Kecamatan: KECAMATAN MERU Desa:	Terpenlehnya Penerangan Jalan Umum	27 unit	Pengusul [22-02-2021]: Sayo Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB permisangan penerangan jalan umum (PJU) 27 Titik tanpa tiang, dengan RAB permisangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:
14	Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Dekripsi: Kaca Cembung; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas (115): Meguclik (Km. Meguclik - Kertawati) s.d. Watubelah (Jl. Watubelah - Kertawati) Kecamatan: KECAMATAN MERU Desa:	Terpenlehnya Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten	9 unit	Pengusul [22-02-2021]: SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Mohon untuk dibersusulkan dari Sub Kegiatan [Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota] dirubah ke Sub Kegiatan [Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota] karena Sub Kegiatan yang mengkomodir KACA CEMBUNG salah ** Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ** . Terimakasih.; TAPD Perencana:
15	Sub Kegiatan: 02. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Dekripsi: Pemasangan Lamsu Penerangan Jalan Umum (DENGAN TIANG); (Lokasi: Jalan Poros Desa 7 Desa, dan Kantor Kecamatan, yaitu: Cicendo, Waleddesa, Waledkoru, Melawani, Okulek, Chalat, dan Kantor Kecamatan); (@Jl. 12,500,000,-); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas (1245): Ambit PJU Cirebon/Kuningan (Waled) - Cicendo (Dpn Kec. Waled)) s.d. Waled Kota (Jl. Lesari - Km1 (Prakemas Waled)); Kecamatan: KECAMATAN WALED Desa:	Terpenlehnya Penerangan Jalan Umum	16 Triliun	Pengusul [03-03-2021]: Mantap... Oya, Status Usulan Belum "Disetujui/Diterima" ... Hatur muhuri; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB permisangan penerangan jalan umum (PJU) 16 Triliun dengan tiang, dengan RAB permisangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:

16	Dekripsi: PIU dengan tiang 4 titik & Jln permalir indah 2 titk poros desa Jln raya imam bonjol, Jln permalir indah 4 dan Jalan raya Dewi sartika 2titk. Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyelamatan/Pertengkaran Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Jln permalir indah titik poros deua-jln raya imam bonjol, Jln permalir indah jln raya dewi sartika Kecamatan: KECAMATAN DUKUPUNTANG Desa: BODONG	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	8 unit	Pengusul [02-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- DAN memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- mengandalkan tang di jalan kabupaten, dengan RAB pememasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- DAN pememasangan penerangan jalan umum (PIU) 2 Titik tidak mengandalkan tang di Jalan Kabupaten, dengan RAB pememasangan 1 (satu) titik Rp. 7.500.000,- dengan Total 10 titik PIU. Terimakasih; TAPO Perencana [09-03-2021]: Pak/pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten dimaksud tuas/mangacu kepada Keputusan Bupati Cbt No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pememasangan PIU nya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan-unitan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau keurahan untuk penganggaran PIU/PIU; Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih;
17	Dekripsi: PIU dengan tiang pemiringan Desa Cipanas; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Jln cipanas girinata, Jln cipanas pegar gunung Kecamatan: KECAMATAN DUKUPUNTANG Desa: CI PANAS	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	17 unit	Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih; TAPO Perencana [09-03-2021]: Pak/pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten dimaksud tuas/mangacu kepada Keputusan Bupati Cbt No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pememasangan PIU nya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan-unitan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau keurahan untuk penganggaran PIU/PIU; Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih;
18	Dekripsi: PIU dengan tiang pemiringan Desa Grimate; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Jln keput-kedungdong, Jln grimate-dukupuntang Kecamatan: KECAMATAN DUKUPUNTANG Desa: GRIMATA	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	12 unit	Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih; TAPO Perencana [09-03-2021]: Pak/pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten dimaksud tuas/mangacu kepada Keputusan Bupati Cbt No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pememasangan PIU nya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan-unitan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau keurahan untuk penganggaran PIU/PIU; Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih;
19	Dekripsi: PIU dengan tiang pemiringan Desa daart; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Jln osaat-siduwang Kecamatan: KECAMATAN DUKUPUNTANG Desa: OSAAAT	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	12 unit	Pengusu [22-02-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Baik / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan penerangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih; TAPO Perencana [09-03-2021]:

Sub Kegiatan: 02. Perbaikan/Peningkatan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

20	Diskripsi: PIU dengan tiang penyangga desa Cisaliheng: Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Diskripsi: PIU (lampu tower) lampu sorot panjang tiang 15 m; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Jln bobes-padiberingharj., Jln ngabeer., Jln cisar-kratik. Kecamatan: KECAMATAN DUKUPUNTANG Desa: CisAlahang	Terperluinya Penerangan Jalan Umum	15 unit	Pengusul [02-02-2021]; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Usulan rencana pemerasan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PIU) 15 Titik dengan tang. dengan RAB pemerasan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana [09-03-2021];
21	Lokasi: Tempat parkir Kecamatan: KECAMATAN GUNUNGJATI Desa: ASTANA Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terperluinya Penerangan Jalan Umum	1 paket	Pengusul [08-03-2021]; Mohon divalidasi; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Terlait dengan detail seputarasi PIU yang Bapak/Ibu Ajukan, Mohon kiranya konsultasikan dulu dengan tim teknis PIU Dinkes Perhubungan. Untuk informasi selanjutnya kami sertakan Nomor Telp.0882 2272 1511. Terimakasih; TAPD Perencana:	
22	Lokasi: 10 Titik di desa Penongan Kecamatan: KECAMATAN PALUWANAN Desa: PANONGGAN Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terperluinya Penerangan Jalan Umum	10 Unit	Pengusul [09-02-2021]; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Usulan rencana pemerasan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PIU) 10 Titik tanpa tiang. dengan RAB pemerasan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana [09-02-2021]; Pak pengurus (kecamatan) harus mencantumkan nama rus jalan kabupaten tempat lokasi pemerasan PIU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Nama rus jalan kabupaten dilakukan harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kep.16- PLR/2020 tentang Penetapan Status Rusas Jalan Kabupaten. Pastikan rus jalan yang disusul pemasangan PIU nya itu rus jalan kabupaten atau jalan poros deca (yang merupakan kelelahan/dishub). Pastikan usulan rus jalan yang dituliskan bukan jalan tingkatan atau jalan deca yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk pengelazaran PIU nya; Pengusul [10-03-2021]; Untuk titik lokasi akan dijajal melalui proposal dan masing-masing kelelahan/desa setelah us diterahnya; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Usulan rencana pemerasan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PIU) 10 Titik tanpa tiang. dengan RAB pemerasan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana [09-03-2021];	
23	Lokasi: II. Kalivadas Pasikalan Kecamatan: KECAMATAN SUMBER Desa: KAULWADAS Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terperluinya Penerangan Jalan Umum	10 titik	Pengusul [02-02-2021]; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Usulan rencana pemerasan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PIU) 13 Titik dengan tang. dengan RAB pemerasan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana:	
24	Lokasi: Desa Depok 4 Titik, Desa Cileduk 3 Titik, Desa Kejuden 3 Titik, Gesegan 3 Titik Kecamatan: KECAMATAN DEPOK Desa: Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terperluinya Penerangan Jalan Umum	13 Titik	Pengusul [02-02-2021]; SKPD Teknik [12-03-2021]; Assalamualaikum... Usulan rencana pemerasan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PIU) 13 Titik dengan tang. dengan RAB pemerasan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana:	

25	Kelurahan/Kota: Deskrisip: Pemasangan PIU di Jalan Poros Kelurahan/Desa Pelai Tang; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02 . PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota: Des:	Lokasi: Kel. Sumber (10 titik), Desa Matanggi II berbatasan Cirea dan Ciwers (12 titik), Desa Matanggi Sebelah Utara (10 titik) Kecamatan: KECAMATAN SUMBER Des:	Terperluhnya Penerangan Jalan Umum	37 Titik	Pengguna: [09-03-2021]: Phak pengusu (kecamatan) harus mencantumkan nama rus jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbr No 670/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan rus jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rus jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan rus jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan yang merupakan kewenangan kelurahan untuk penganggaran PIUnya; Pengguna: [10-03-2021]: Untuk lokasi PIU akan diajukan melalui proposal dari masing-masing kelurahan/deca sekaligus denahnya; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemاسangan jalan umum (PIU) 32 Titik tidak menggunakan tiang di Jalan Poros Desa, dengan RAB pemاسangan 1 [satut] titik Rp. 7.500.000,- Terimakasih;
26	Kelripsi: Pemasangan PIU di Jalan Poros Desa Tanpa Tiang; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02 . PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota: Des:	Lokasi: Kel. Tukmedui (20 titik), Kel. Segungan (3 titik), Kel. Kemantren (8 titik), Kel. Watulahar (8 titik), Kel. Kenanga (5 titik) Kecamatan: KECAMATAN SUMBER Des:	Terperluhnya Penerangan Jalan Umum	44 Titik	TAPD Perencana: [08-03-2021]: Phak pengusu (kecamatan) harus mencantumkan nama rus jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbr No 670/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan rus jalan yang disusulkan pemasangan PIUnya itu rus jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan rus jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa atau kelurahan untuk penganggaran PIUnya, dan juga pastikan lokasinya bukan di jalan provinsi; Pengusu: [10-03-2021]: Untuk titik lokasi PIU akan diajukan melalui proposal dari masing-masing kelurahan/deca sekaligus denahnya; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemاسangan jalan umum (PIU) 44 Titik tidak menggunakan tiang di Jalan Poros Desa, dengan RAB pemاسangan 1 [satut] titik Rp. 7.500.000,- Terimakasih;
27	Deskrisip: Pemasangan PIU di Jalan Poros Desa/Kelurahan Tanpa Tiang; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02 . PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota:	Lokasi: Kel. Tukmedui (20 titik), Kel. Segungan (3 titik), Kel. Kemantren (8 titik), Kel. Watulahar (8 titik), Kel. Kenanga (5 titik) Kecamatan: KECAMATAN SUMBER Des:	Terperluhnya Penerangan Jalan Umum	2 Titik	Deklarasi: Pemasangan jalan Umum (PIU) Hamparan Rusas Jalan Pasaleman-Cigebang (jalan kabupaten) Lokasi di Desa Pasaleman; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02 . PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAU);
28		Lokasi: Desa Pasaleman Kecamatan: KECAMATAN PASALEMAN Desa: PASALEMAN	Terperluhnya Penerangan Jalan Umum	13.500.000,- Terimakasih;	Pengguna: [12-03-2021]: Deskripsi sudah diperbaiki mohon kroscek lagi; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PIU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemاسangan jalan umum (PIU) 2 Titik dengan standar dengan RAB pemاسangan 1 [satut] titik Rp.

Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

29	Dikripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar (jl. Kabupaten) Tidak Pakai Tiang : - Jl. Pasaleman-Cigebang 2 titik - Jl. Cengkrang-Torlong 4 titik - Jl. Cengkrang-choe 2 titik; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Cigebang, Desa Torlong, dan Desa Cengkrang Kecamatan: KECAMATAN PASALEMAN Desa:	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	B Tdk	Pengusu [02-03-2021]: Ok. Makasih; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 1D Tdk tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 7.500.000,-. Terimakasih; TAFD Perencana;
30	Dikripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar (jl. Pores Desa) tidak pakai tiang: - Jl. Cengkrang gring 2 titik - Jl. Cigebang yangi 3 titik - Jl. Torlong-Tanjungasm 5 Titik; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan	Lokasi: Desa Cigebangwari, Desa Cigebanggring dan Desa Tanjungasm Kecamatan: KECAMATAN PASALEMAN Desa:	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	10 Tdk	Pengusu [02-03-2021]: Ok. Makasih; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 1D Tdk tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 7.500.000,-. Terimakasih; TAFD Perencana;
31	Desripsi: Pemasangan carmin cembung (jaca pembesar dipertematan jalan desa); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 01. Pemasangan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Pasaleman dan Desa Cigebang Kecamatan: KECAMATAN PASALEMAN Desa:	Terpenuhinya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	2 Tdk	Pengusu [02-03-2021]: Ok. Sub Kegiatan sudah di rubah menjadi cek kembal; SKPD Teknis (12-03-2021): Terimakasih, Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan Carmin Cembung (jaca Cembung) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan 2 titik Carmin Cembung (jaca Cembung), dengan Satu pemasangan 1 (satu) titik Rp. 4.500.000,-. TAFD Perencana;

32	Deskripsi: Penerangan jalan umum (PJU); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Gumariling Lubuk Kecamatan: KECAMATAN GUMARILING Desa: GUMARILING LEBAK	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Pengujul (24-02-2021); PJU Lokasi Desa Gumariling Lubuk setiap 10 Titik Pulu Anggaran Rp. 85.000.000,- SKPD Terim [11-03-2021]: Assalemualaikum.. Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana [09-03-2021]: Pakai pengujul (kecematam) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten tempat lokasi pememasangan PJU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kepo.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang diusulkan pememasangan ini/tujuh itu rusas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kawasan yang Ditolak). Pastikan usulan rusas jalan yang diusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kawasan Desa untuk penganggaran PJUnya.
33	Deskripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU) tanpa tiang, Desa Cirebon Girang, Desa Wanabaya Lor dan Desa Kecomberan; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas [1323]: Cirebon Girang (UK. Kecombahan - Cirebon Girang) s.d. Sampiran (UK. Kepompong - Sampiran) Kecamatan: KECAMATAN TALUN Desa: CIREBON GIRANG	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	24 Titik	Pengujul (25-02-2021); SKPD Terim [12-03-2021]: Assalemualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 24 Titik tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:
34	Deskripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU) + Tiang; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Cirebon Girang, Desa Kecomberan, Desa Wanabaya Kudu dan Desa Kerandon Kecamatan: KECAMATAN TALUN Desa: KERANDON	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	21 Titik	Pengujul (25-02-2021); SKPD Terim [12-03-2021]: Assalemualaikum... Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 21 Titik dengan tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:
35	Deskripsi: penerangan jalan umum jalan kabupaten/kota; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: desa keratasure, pegagan kidul, pegagan lor, dukuh, karangkendal, gregel, lapetakan, buring lor, dan bungku Kecamatan: KECAMATAN KEPETAKAN Desa:	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	3 Titik	Pengujul (01-02-2021); SKPD Terim [12-03-2021]: Assalemualaikum.. Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana [09-03-2021]: Pakai pengujul (kecematam) harus mencantumkan nama rusas jalan kabupaten tempat lokasi pememasangan PJU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Nama rusas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cib No 620/Kepo.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan rusas jalan yang diusulkan pememasangan PJUnya itu rusas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kawasan yang Ditolak). Pastikan usulan rusas jalan yang diusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kawasan Desa untuk penganggaran PJUnya.
36	Deskripsi: PJU jalan Poros Kabupaten (Plus Tiang); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELINGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Ruas [114]: Karangwareng (Batas (43BB) s.d. Sumurkondong (Batas Kebuatan Kuningan) Kecamatan: KECAMATAN KARANGWARENG Desa: KARANGWARENG	Terpenutuhnya Penerangan Jalan Umum	10 Titik	Pengujul (04-03-2021); SKPD Terim [12-03-2021]: Assalemualaikum.. Usulan rencana pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 10 Titik dengan tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 13.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:

Sub Kegiatan: 02. Perbaikan Penyelesaian jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

37	<p>Deskripsi: Pemasangan PJU; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan penyelesaian jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>Sub Kegiatan: 02. perbaikan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>Dikelpt: Penyelesaian jalan (PJU);</p> <p>Desa Walahar (LED 20 Watt Plus Tiang) sebanyak 20 titik;</p> <p>Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;</p> <p>Program: 02. PROGRAM PENELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p>	<p>Lokasi: Ruas [1335]; Kaliwari [UK- Panggang Ambulu (00/40)] s.d. Mulyasari [ID. Kaliwahan - Mulyasari] Kecamatan: KECAMATAN LOSARI Desa:</p> <p>Kabupaten/Kota;</p>	<p>Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum</p>	37 Titik	<p>Pengusul [24/02/2021]: Wahidkumussalam Ww Wth. Pemasangan PJU usulan dari Kec. Losari PJU tanpa tiang, mohon untuk di validasi;</p> <p>SKPD Terlitis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) 37 Titik tanpa tiang, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- Terimakasih; TAPD Perencana [15-03-2021]:</p>
38	<p>Sub Kegiatan: 02. perbaikan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>Dikelpt: Penyelesaian jalan (PJU);</p> <p>Desa Walahar (LED 20 Watt Plus Tiang) sebanyak 20 titik;</p> <p>Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;</p> <p>Program: 02. PROGRAM PENELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p>	<p>Lokasi: Ruas [1379]; Cheuringin [Palimantan-Bts. Majalengka/Cirebon (km 22,59) s.d. Walaha [UK. Walaha - Cupang] Kecamatan: KECAMATAN GEMPOL Desa: WALAHAR</p>	<p>Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum</p>	20 Titik	<p>Pengusul [12-03-2021]: Wahidkum salam untuk dicatat sudah ditambahkan PJU 20 watt dengan tiang sebanyak 20 titik untuk desa Walahar terimakasih. Sdh dirubah pk.;-</p> <p>SKPD Terlitis [12-03-2021]: Terimakasih, Assalamualaikum... Usulan rencana pemisangan penyelesaian jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu Ajukan memenuhi RAB pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU). LED 20 watt ** 20 (dua puluh) ** Titik menguntukan tiang dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 11.500.000,- D; TAPD Perencana;</p>
39	<p>Sub Kegiatan: 02. perbaikan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>Dikelpt: Penyelesaian jalan Umum (PJU);</p> <p>Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;</p> <p>Program: 02. PROGRAM PENELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p>	<p>Lokasi: Lemahabang Kecamatan: KECAMATAN LEMAHASANG Desa:</p>	<p>Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum</p>	32 Titik	<p>Pengusul [15-03-2021]: Rp.292.500.000 [24 Tanpa Tiang @ Rp7.500.000 dan 9 dengan Tiang @12.500.000] Desa : Sarjaya 4 Titik tanpa tiang plus 5 titik dengan tiang. Lawevidence 4 Titik tanpa tiang. Picungpur 4 Titik tanpa tiang. Belawa 4 Titik tanpa tiang. Wangkeling 4 titik tanpa tiang, Sagong 4 Titik tanpa tiang, dan Tuk Karangsawung 4 titik tanpa tiang plus 4 titik dengan Tiang; SKPD Terlitis [15-03-2021]: Assalamualaikum.... Hasil Verifikasi dan pemohonan dari kecamatan Lemahabang bahwa PJU tanpa tiang pada ruas jalan poros 24 Titik @ 7.500.000 dan dengan Tiang 8 Titik @ 12.500.000; TAPD Perencana: Pakak pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kecamatan tempat lokasi pemasangan PJU dalam deskrpsi pekerjaan atau lokasi. Nama ruas jalan kecamatan dimaksud harus mangga kepada Kepatuhan Bupati Cbr No 620/Kep.16-PUPR/2020 tentang Penetapan Standart Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pemasangan PJUnya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kawasan yang dilintasi). Pastikan usulan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan Kawasan Desa untuk penganggaran PJU;</p> <p>Pengusul [08-03-2021]: Tanpa Tiang & sebanyak 8 titik;</p> <p>SKPD Terlitis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) 8 Titik tanpa tiang di jalan poros desa, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 7.500.000,- Terimakasih; TAPD Perencana:</p>
40	<p>Sub Kegiatan: 02. perbaikan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p> <p>Dikelpt: Pemasangan penyelesaian jalan umum tanpa tiang untuk 7 (tujuh) titik di desa Karangsembung;</p> <p>Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;</p> <p>Program: 02. PROGRAM PENELLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ); Kegiatan: 2.02. Perbaikan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;</p>	<p>Lokasi: Ruis [1358]; Kubangkarang (UK. Ender - Karangsembung) s.d. Karangsembung [ID. Karangsawung - Karangmekar] Kecamatan: KECAMATAN KARANGSEMBUG Desa: KARANGSEMBUG</p>	<p>Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum</p>	8 Titik	<p>Pengusul [24/02/2021]: Waafiq: Kubangkarang tanpa tiang, mohon untuk di validasi;</p> <p>SKPD Terlitis [12-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pemasangan penyelesaian jalan umum (PJU) 8 Titik tanpa tiang di jalan poros desa, dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 7.500.000,- Terimakasih; TAPD Perencana:</p>

41.	Dekripsi: Pemasangan pererangan pada jalan umum menggunakan tiang untuk 8 (delapan) titik di desa Kubangsariang Kecamatan Karangsembung	Lokasi: Suas (1358): Kubangsariang (Kec. Ender - Karangsembung) s.d. Karangsambung (Jl. Karangsambung - Karangmekar)	Kecamatan: KECAMATAN KARANGSEMBUNG Desa: KUBANGSARIANG	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	8 Titik	Pengusu/ (26-03-2021): Menggunakan Tiang; SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum...,, Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PJU) yang Baik / Ibu ayah memenuhi RAS pemasangan pererangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana:
42.	Dekripsi: Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Porse Jalan Bandungan-Setiapmik (Titik Desa Bandungan, Luwung, Popen, Mundumeuleut dan Setiopmik) Jalan Mundu - Pemengkang (Desa Mundupesir, Sudi, Banjawanwangun dan Pamengkang) Jalan Sinarancang-Nanggala (Desa Sinarancang dan Jalan Chemur-Warutuwur (Desa Citemu dim Warutuwur); Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02_ PROGRAM PENELAKU/REGULASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Bandungan, Luwung, Popen, Mundumeuleut dan Setiopmik (Titik Desa Bandungan, Luwung, Popen, Mundumeuleut dan Setiopmik) Jalan Mundu - Pemengkang (Desa Mundupesir, Sudi, Banjawanwangun dan Pamengkang) Jalan Sinarancang-Nanggala (Desa Sinarancang dan Jalan Chemur-Warutuwur (Desa Citemu dim Warutuwur); Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02_ PROGRAM PENELAKU/REGULASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Sub Kegiatan: 02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	12 Unit/buah	Pengusu/ (12-03-2021): Tidak menggunakan tiang mandiri tetapi Numpang pada Tiang PJU yang Nilai Satuannya sebesar Rp. 8.500.000,- X 12 Desa = Rp. 102.000.000/-; SKPD Teknis (12-03-2021): TAPD Perencana (15-03-2021): ok;
43.	Dekripsi: Penerangan Jalan; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02_ PROGRAM PENELAKU/REGULASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Desa Kalithea, Kedawung, Kedungdawa, Kodungjaya, Kartawinangun, Prangsan, Sutewinangun, Tuk Kecamatan: KECAMATAN KEDAWUNG Desa:	Sub Kegiatan: 02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	32 Unit	Pengusu/ (19-02-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum...,, Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PJU) yang Baik / Ibu ayah memenuhi RAS pemasangan pererangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- . Terimakasih; TAPD Perencana (09-03-2021): Pinak pengusulan (kecamatan) harus mencantumkan nama rute jalan kabupaten tempat lokasi pemasangan PJU dalam deskripsi pekerjaan atau lokasi. Name rute jalan kabupaten dimaksud harus mencantumkan kepada Kepotpi Cbt No 62/0/Xep.16-PURB/2020 tentang Penetapan Status Rute jalan Kabupaten. Pastikan rute jalan yang diusulkan pemasangan PJUnya itu rute jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dinhub). Pastikan unitam rute jalan yang diusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa untuk penganggaran PJUnya;
44.	Dekripsi: Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tidak Menggunakan Tiang; Jenis Belanja: Usulan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02_ PROGRAM PENELAKU/REGULASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Lokasi: Rues (150): Pangeman (Jl. Cirebon - Losari km 16,75) s.d. Karangmalang (#3383) Kecamatan: KECAMATAN PANGEMAN Desa: PANGEMAN	Sub Kegiatan: 02_Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	30 titik	Pengusu/ (25-02-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum...,, Usulan rencana pemasangan pererangan jalan umum (PJU) yang Baik / Ibu ayah memenuhi RAS pemasangan pererangan jalan umum 1 (satu) titik Rp. 8.500.000,- dan dengan tiang 3 dengan RAS pemasangan 1 (satu) titik Rp. 13.500.000Terimakasih; TAPD Perencana: satipo PJU harus di pasang jalan Kewenangan Kabupaten;
45.	Dekripsi: Penerangan dan pemerasangan jalan umum Kabupaten/Kota;	Lokasi: jalan Gotong Royong_Desa Babutan Kishul Kecamatan: KECAMATAN BABUTAN	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	10 Titik/Buah	Pengusu/ (08-03-2021): SKPD Teknis (12-03-2021): Assalamualaikum.... Mohon penyelesaian untuk spesifikasi usulan PJU, PJU pokal tiang atau PJU tidak pokal tiang. Terimakasih;	

	Desa: PABUARAN KEDUL	TARD Perencana:	
ANGKUTAN JALAN (LAJ)	Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota: Sub Kegiatan: 02.. Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota:	6 Truk/unit	Pengisian [08-03-2021]: SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum.... Mohon perijinan untuk membuat jalan pjlu pakai tiang atau pjlu tidak pakai tiang. Terimakasih; TARD Perencana:
46	Lokasi: Lapang Beli Teman Sutakria Desa: Pabuaran Lor Kecamatan: KECAMATAN PABUARAN Desa: PABUARAN LOR Deskripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02.. Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	Pengisian [08-03-2021]; SKPD Teknis [12-03-2021]: Assalamualaikum.... Mohon perijinan untuk membuat jalan pjlu Pakai tiang atau pjlu tidak pakai tiang. Terimakasih; TARD Perencana: Phisik bersamaan (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten tempat lokasi pemasangan pjlu dalam dekrisi pekerjaan atau lokasi. Nama ruas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbr No.620/Kep.16-PUPR/R/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pemasangan pjluya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa untuk penganggaran pjluye;
47	Lokasi: Desa tuluhbanteng lor Kecamatan: KECAMATAN PABUARAN Desa: Deskripsi: Penerangan Jalan Umum (PJU); Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02.. Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	Pengisian [23-03-2021]; Usulan tadinya 14 Tiang sedi 13 Tiang Rp. 162.500.000,- SKPD Teknis [23-03-2021]: Assalamualaikum.... Usulan rencana pemasangan penenagan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ayahku memenuhi RAB pemasangan penenagan jalan umum (PJU) 13 Tiang dengan tiang. dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 12.500.000,- Terimakasih; TARD Perencana:
48	Lokasi: Rusa [14]: Karangwareng [43.286] x d. Sumurkondong (Setab Kabupaten: Kuningan) Kecamatan: KECAMATAN KARANGWARENG Desa: SEUSEUPAN Deskripsi: PJU Jalan Posisi Desa Plus Tiang; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02.. Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum	Pengisian [09-03-2021]; SKPD Teknis [12-03-2021]: kondis dengan tiang; TARD Perencana: Phisik pengusul (kecamatan) harus mencantumkan nama ruas jalan kabupaten tempat lokasi pemasangan pjlu dalam dekrisi pekerjaan atau lokasi. Nama ruas jalan kabupaten dimaksud harus mengacu kepada Keputusan Bupati Cbr No.620/Kep.16-PUPR/R/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten. Pastikan ruas jalan yang disusulkan pemasangan pjluya itu ruas jalan kabupaten atau jalan poros desa (yang merupakan kewenangan Dishub). Pastikan usulan ruas jalan yang disusulkan bukan jalan lingkungan atau jalan desa yang merupakan kewenangan Desa untuk penganggaran pjluye;
49	Lokasi: Jalan Kabupaten Kecamatan: KECAMATAN SUSUKAN Des: Deskripsi: Pemasangan Lampu PJU; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 02.. Penyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;	40 unit	Pengisian: SKPD Teknis [11-03-2021]: Assalamualaikum... Usulan rencana pemasangan penenagan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ayahku memenuhi RAB pemasangan penenagan jalan umum (PJU) 8 Tiang dengan tiang. dengan RAB pemasangan 1 (satu) titik Rp. 13.500.000,- Terimakasih; TARD Perencana:
50	Lokasi: Rusa [1291]; ID: Suranenggrala Lor (Cirebon - Batas Cirebon/ Indramayu (Singakerta)) s.d. [E... Adjawinangun - Suranenggrala] Kecamatan: KECAMATAN SURANENGGRALA Deskripsi: Pemasangan Lampu Penenagan Jalan Umum (PJU) Making- masing Desa @ 4 Unit; Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD; Program: 02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ); Kegiatan: 2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	8 Unit	

Kabupaten/Kota:
Sub Kegiatan 02: Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota:
Dikripsi: Pengadaan dan Perbaikan Penarangan Jalan Umum (PJu)
51 menggunakan Tiang;
Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;
Program: 02. PROGRAM PENYELINGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ);
Kegiatan: 2.02. Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

Desa: SURANEIGGAU LOH

Kabupaten/Kota:
Sub Kegiatan 02: Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota:
Dikripsi: Pengadaan dan Perbaikan Penarangan Jalan Umum (PJu);
51 menggunakan Tiang;
Jenis Belanja: Urusan/Program/Kegiatan SKPD;
Program: 02. PROGRAM PENYELINGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ);
Kegiatan: 2.02. Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: 02. Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota;

Pengusul (25-02-2021);
SCPD Teknis (18-03-2021); Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penarangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan 1 (satu) titik Rp. 13.500.000,-. Terimakasih;
TAPD Perencana:

3 Titik	Terpenitiinya Penarangan Jalan Umum	Pengusul (25-02-2021); SCPD Teknis (18-03-2021); Assalamualaikum... Usulan rencana pememasangan penarangan jalan umum (PJU) yang Bapak / Ibu ajukan memenuhi RAB pememasangan 1 (satu) titik Rp. 13.500.000,-. Terimakasih; TAPD Perencana:
---------	---	---

Lokasi: Ruas (150) Pangenan [N. Grebon - Lebak km 16, 75] s.d. Karangmalang (43323). Kecamatan KECAMATAN PANGENAN Desa: PANGENAN	Terpenitiinya Penarangan Jalan Umum	3 Titik
--	---	---------

BAB III.

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Sehubungan dengan tersebut Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini akan berakhir maka sebagai acuan berikutnya dalam perencanaan pembangunan perhubungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2025.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong

seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum masal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pangsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (*fresh good and high value*); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penangganya**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan koneksi antar wilayah	Belum maksimalnya, perlengkapan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di sebagian wilayah Timur	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Kerjasama antara Pemda, Dishub Provinsi dan Kementerian Perhubungan
---	--	-----------------------------------	--

3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Jawa Barat 2018 – 2023 telah dilakukan telaahan antara lain ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon antara lain adalah:

- a. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.
- b. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.
- c. Tercapainya pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan darat maupun laut.

Adapun sarana yang akan dicapai yaitu meningkatnya sarana angkutan yang memadai dan selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan
2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan
4. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut
5. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Transportasi Publik
6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Jalan
7. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas

3.3. Program dan kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan Tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu SKPD. Sesuai dengan hasil Forum SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut yang merupakan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Berpedoman pada hasil forum SKPD Dinas Perhubungan Kota Tangerang, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 4) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

- 5) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 6) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 8) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 9) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

10) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan pada Tahap Perubahan tahun 2022 bisa dilihat table dibawah ini :

Tabel 3.1

**RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
USULAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATIF ANGGARAN**

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KELLARJAN	INDIKATOR HASIL	ANGGARAN	KET
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.15.01.		PROGRAM PENUJUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.15.01.2.01.		Percentage Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima	Kabupaten Cirebon	Percentage Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima	100 Persen	100 Persen	-
01.		Percentage Pemenuhan Disiplin Aparatur	Kabupaten Cirebon	Percentage Pemenuhan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	-
02.		Percentage Pemenuhan Capaian Kinerja	Kabupaten Cirebon	Percentage Pemenuhan Capaian Kinerja	100 persen	100 persen	-
03.		Penjabaran Komite dan Program Renstra kedalam Renja	Kabupaten Cirebon	Penjabaran Komite dan Program Renstra kedalam Renja	100 Persen	100 Persen	-
04.		Percentage Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	Kabupaten Cirebon	Percentage Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.	80 Persen	80 Persen	-
05.		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kabupaten Cirebon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Dok	161,255,480	-
06.		Pengusulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Setormal	7 Dok	65,280,080	-
07.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	-
08.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perintah RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dokumen perintah RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-
09.		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-
10.		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dokumen penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-
11.		Koordinasi dan Penyusunan Perjalanan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dokumentasi perjalanan DPA-SKPD	6 Dok	26,858,000	-
12.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisad Rumah tangga SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisad Rumah tangga SKPD	3 Kegiatan	69017,400	-
13.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	9,123,411,000	-
14.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67 Raport	9,063,805,200	-
15.		Penyampaikan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	Penyampaikan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok	1 Dok	-
16.		Pendekan Administrasi Perekonomian Tugas ASN	Kabupaten Cirebon	Pendekan Administrasi perekonomian tugas ASN	1 Dok	1 Dok	-
17.		Pelaksanaan Protokol dan Pengujian Verifikasi Keanggotaan SKPD	Kabupaten Cirebon	Pelaksanaan Protokol dan Pengujian Verifikasi Keanggotaan SKPD	1 Dok	1 Dok	-

		Koordinasi dan Pekarangan Akuntansi SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersediaanya Pekarangan Akuntansi SKPD	1 Dok	-
2.15.01.01.2.02 .04.	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pekarangan Keuangan Akhir Tahun dan Akhir Periode	1 Dok	17.874.600	-
2.15.01.01.2.02 .05.	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tengahpan	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tengahpan Pemerintahan	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.02 .06.	Pemeriksaan	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Laporan Keuangan Pendek	2 Dok	39.732.000	-
2.15.01.01.2.02 .07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bantuan/Tujuhan/Semua/ SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.02 .08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Adminstrasi Barang Milik Daerah	2 Dok	0	-
2.15.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kabupaten Cirebon	Tersedianya Inventaris Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.03 .01.	Penyelesaian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Inventaris Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.03 .02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Keg	-	-
2.15.01.01.2.03 .03.	Koordinasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.03 .04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Kegiatan Pekarangan Pengawasan dan Pengendalian BMD	2 Dok	-	-
2.15.01.01.2.03 .05.	Rokonitas dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Rokonitas dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Keg	-	-
2.15.01.01.2.03 .06.	Penerusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penerusahan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.03 .07.	Penerusahan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penerusahan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04	Pemantauan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .01.	Analis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Perkataan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .02.	Pembuatan dan Penyiarkan/umpan Kebijakan Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penyolkhan dan Penyiarkan/umpan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Keg	-	-
2.15.01.01.2.04 .03.	Pendanaan dan Padafturan Objek Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Pendanaan dan Pendafturan Objek Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .04.	Pengelolaan Objek Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pengelolaan Objek Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .05.	Penerapan Wajib Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Penerapan Wajib Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .06.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.04 .07.				3 Kegiatan	123.422.000	-
2.15.01.2.05. Administrasi Kepengawalaan Perangkat Daerah						-
2.15.01.01.2.05 .01.	Peningkatan Sosial dan Prasrama Disiplin Pegawai	Kabupaten Cirebon	Peningkatan Sosial dan Prasrama Disiplin Pegawai	1 Dok	-	-
2.15.01.01.2.05 .02.	Pengdama Pekerjaan Dinas Bantuan Au/Bantuan Kelembagaannya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Pekerjaan Kerja Lapangan Pegawai	5 Jenis	123.422.000	-

2.15.01.01.2.05 .03	Pendukung dan Pengelolaan Administrasi Kepemerintahan	Kabupaten Cirebon	Tersedia Sistem informasi Kepemerintahan	1 Dok	-
2.15.01.01.2.05 .04	Kordinasi dan Pekerjaan Sistem Informasi Kepemerintahan	Kabupaten Cirebon	Terikatannya Koordinasi dan Pekerjaan Sistem Informasi Kepemerintahan	1 Dok	-
2.15.01.01.2.05 .05	Maintenence, Evaluasi, dan Perekham Kinerja Pegawai	Kabupaten Cirebon	Terikatannya Mantaining, Evaluasi, dan Perekam Kinerja Pegawai	4 Keg	-
2.15.01.01.2.05 .06	Pendukung dan Pelaksana Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Cirebon	Terikatannya Pendukung dan Pelaksana Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	-
2.15.01.01.2.05 .07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Terikatannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Keg	-
2.15.01.01.2.05 .08	Himbauan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Terikatannya Himbauan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	-
2.15.01.01.2.05 .09			Terpenaunya Administrasi Umum Pendukung Kinerja Pegawai	9 kagiatan	718.792.420
2.15.01.01.2.05 .10	Himbauan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Ketentuan Komponen Instansi Lurasi Peraturan	7 Jenis	1.263.7.000
2.15.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instansi Lurasi Peraturan	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Ketentuan Peraturan dan Perbergantungan	6 jenis	168.494.420
2.15.01.01.2.06 .02	Bantuan Kantor	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Ketentuan Peraturan dan Perbergantungan	13 jenis	213.365.900
2.15.01.01.2.06 .03	Penyediaan Perlakuan dan Perbergantungan	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Barang Cetakan dan Penggantian	8 jenis	57.289.400
2.15.01.01.2.06 .04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40 jenis	94.920.500
2.15.01.01.2.06 .05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Alat Tulis Kantor (ATK)	143) Orang	22.990.000
2.15.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Material	Kabupaten Cirebon	Tersedaya lokasi dan Minuman Tamu dan Rujab Dinas	250 koli	149.175.000
2.15.01.01.2.06 .07	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Raport-rapor Koordinasi dan Konsumsi ke Luar Daerah	1 Dok	-
2.15.01.01.2.06 .08	Penyediaan Rujam Kosher dan Kantolasi	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Arsip Dinas pada SKPD	2 Paket	-
2.15.01.01.2.06 .09	Penyediaan Arsip Dinas pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Sistem Pemanitahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Kegiatan	488.537.000
2.15.01.01.2.06 .10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja	2 unit	-
2.15.01.01.2.07 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Kondisi dan Peranginan Dinas atau Kondisional Dinas jalan	5 Unit	400.000.000
2.15.01.01.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lajugan	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Kendaraan Dinas / Operasional	14 bus	88.517.000
2.15.01.01.2.07 .03	Pengadaan Mesin	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Mesin	3 Jenis	-
2.15.01.01.2.07 .04	Pengadaan Perlakuan dan Metri Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Perlakuan dan Metri	1 Gedung	-
2.15.01.01.2.07 .05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Pemangaman Gedung	10 Unit	-
2.15.01.01.2.07 .06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenaunya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

2.15.01.2.07 .11.	Pembuatan Sarana dan Prasarana Perekukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perekukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	2. Kedudukan	31.618.462.606
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Usulan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Usulan Pemerintahan Daerah	5 Keg	5 Keg	-
2.15.01.01.2.08 .01.	Penyediaan Jasa Sistem Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Sistem Masyarakat	4 Rekening	31.618.462.606	-
2.15.01.01.2.08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	10 Keg	-	-
2.15.01.01.2.08 .03.	Penyediaan jasa Perbaikan dan Perlembagaan Kantor	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Perbaikan dan Perlembagaan Kantor	30 Orang	-	-
2.15.01.01.2.08 .04.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Kedudukan	789.837.041	-
2.15.01.2.09.	Penyeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	16 unit	114.340.000	-
2.15.01.01.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Penyeliharaan, Biaya Penyeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Pemerintahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalan	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Jasa Penyeliharaan, Biaya Penyeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Pemerintahan Dinas atau Kendaraan Dinas Jalan	50 Unit	41.595.000	-
2.15.01.01.2.09 .02.	Penyeliharaan, Biaya Penyeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepaslah	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan, Biaya Penyeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepaslah	30 Unit	-	-
2.15.01.01.2.09 .05.	Penyeliharaan Pendidikan dan Melintasi Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan Pendidikan dan Melintasi Lainnya	1 Gedung	504.172.041	-
2.15.01.01.2.09 .06.	Penyeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagian Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagian Lainnya	1 Unit	69.750.000	-
2.15.01.01.2.09 .09.	Penyeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000 Meter	-	-
2.15.01.01.2.09 .10.	Penyeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya	24.332.299.292	-	-
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)		Meningkatnya Prosentase Ketermediasi Praarwana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	55 Prosen	-	-
			Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang tepat	40 Prosen	-	-
			Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas	84 Prosen	-	-
			Rasio Ketermediasi Sarana dan Praarwana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi	76,93 Prosen	-	-
			Persektase ketersediaan sarana dan Praarwana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	55 Prosen	-	-
			Persektase kepemilikan KTP/Walib Uji angkutan Umum	66,6 Prosen	1.474.130,700	-
			Meningkatnya Prosentase Ketermediasi Praarwana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	45,5 Prosen	22.858.168,592	-
2.15.02.2.01.	Penerapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Dok	143.878.760	-
2.15.02.2.01 .01.	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-

215.02.02.2.01 .02.	Peningkatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kebijakan Transportasi Yang terampatkan Pada Mayarakat	1 Dokumen	1.43.818.700
2.15.02.2.02. 01.	Pengembangan Perekembangan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terkaitanya Pengembangan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten	1 Kegiatan	-
2.15.02.2.02. 01.	Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terpasangnya Perlonggaran jalan di jalan Kabupaten	10 Jenis	17.799.049.658
2.15.02.2.02. 02.	Penyediaan Perlonggaran jalan di jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terpenitinya Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten	10 jenis	795.849.234
2.15.02.2.02. 03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan	Kabupaten Cirebon	Terpenitinya Pembangunan Prasarana jalan Umum	4.000 batah	14.046.817.842
2.15.02.2.02. 04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlonggaran jalan	Kabupaten Cirebon	Terlaksanya dan terciptanya Prasaranra jalan	10 jenis	-
2.15.02.2.02. 05.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlonggaran jalan	Kabupaten Cirebon	Terpenitinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlonggaran jalan (PjJ)	3.000 Rb/t	2.956.380.588
2.15.02.2.03. 01.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pemeliharaan	1 Unit	780.961.000
2.15.02.2.03. 02.	Penyusinan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Penyusinan Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2 dokumen	-
2.15.02.2.03. 03.	Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Gedung Terminal di Kabupaten Cirebon	1 Gedung	-
2.15.02.2.03. .03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Cirebon	Terhadanya halte bus, halte BRT, taxi	1 Lekasi	197.601.400
2.15.02.2.03. .04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal /Sarana Umara dan Pendidikan,	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal /Sarana Umara dan Pendidikan	6 Unit	199.399.800
2.15.02.2.03. .05.	Pengelolaan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kabupaten Cirebon	Jumlah SDM pengelola Terminal Arigutan Dari yang profesional	30 orang	381.299.800
2.15.02.2.04. 01.	Pembentukan halte Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Tamu Parkir dan Terpenitinya Fasilitas Penyeberangan Penyeberangan dan Parkir	1 Unit	2.145.200.000
2.15.02.2.04. 02.	Fasilitasi penyeberangan Penyeberangan Porolehan Istim Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Peritama Berusaha Terkhusus secara Eletronik	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Perdelehan Istim Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Peritama Berusaha Tersempati secara Eletronik	1 Kegiatan	1.306.000.000
2.15.02.2.04. .02.	Koordinasi dan Sekretariat Pengawasan Peritama Istim Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pengguna Parkir yang Boleh	500 Orang	239.700.000
2.15.02.2.05. 01.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Kendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian	18.000 Unit	1.474.130.700
2.15.02.2.05. 02.	Pengujian Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Sarana dan Prasarana Pengujian Yang Layak Fungi	4 paket	226.995.800
2.15.02.2.05. .03.	Pengujian Kapasitas Sumur Daya Maksim Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Pengujian Kendaraan Bermotor	10 Drang	-
2.15.02.2.05. .03.	Pengujian Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Buku Lihui Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Smart Card	10.000Smart Card	539.990.000
2.15.02.2.05. .04.	Pengujian Berkala Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terpanitiinya Sosialisasi Bagi Pemilik Berkala Kendaraan / Barang	20 Keg	-
2.15.02.2.05. .05.	Sosialisasi Soedir Operasional Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Data Pemerintah Kendaraan Wajib Uji	1 Dok	-
2.15.02.2.05. .06.	Identifikasi dan Analisa Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Cirebon			

	2.15.02.02.2.05 .07.	Pembahasan Sosro dan Prasasti Pengibaran Berkala Kandilran Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terpilihannya struktur dan pengujian kendaraan bermotor	9 jenis	210.187.000
	2.15.02.02.2.05 .08.	Koordinasi Penyelegeraan Pengibaran Berkala Kandilran Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Koordinasi Pengibaran Berkala Kendaraan Bermotor	4 Keg	-
	2.15.02.02.2.05 .09.	Pengujian Tarif Retribusi Pengibaran Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terseluruhnya Pengujian Tarif Pengibaran	1 Dok	-
	2.15.02.02.2.05 10.	Monitoring dan Evaluasi Penyelegeraan Pengibaran Berkala Kendilran Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terseluruhnya Dokumen Evaluasi	1 Dok	-
	2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pelaksanaan Angketan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas	100	1.232.171.536
	2.15.02.02.2.06 01.	Pembinaan Pelaksanaan dan Kedayaan Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Relaysa Lalu Lintas Utk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dok	30.872.600
	2.15.02.02.2.06 02.	Pengibaran, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Cirebon	Terwujudnya dan terpeliharanya Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3 Keg	-
	2.15.02.02.2.06 03.	Lji Coba dan Soalhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Uji Coba dan Soalhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Keg	102.352.600
	2.15.02.02.2.06 04.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian	9 Kegiatan	683.509.036
	2.15.02.02.2.06 05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota (Anthallo) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Forum lalu lintas dan angkutan jalan	6 Kegiatan	73.437.200
	2.15.02.2.07.	Persepsi dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Anthallo) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen analisis yang di sejajarkan dengan hasil	32 Dok	374.357.600
	2.15.02.02.2.07 01.	Pengembangan Kapasitas Perilaku Anthallo	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Dokumen Teknis Penitiran Lalu Lintas & Kesiapatan Cirebon	1 Dok	131.064.200
	2.15.02.02.2.07 02.	Koordinasi dan Sinergitas Perilaku Hсти Anthallo	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rencana Anthallo yang profesional	5 orang	-
	2.15.02.02.2.07 03.	Pengembangan Kesiapan Anthallo	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Kesiapan dan Sinergitas Pemberian Anthallo	30 Kegiatan	241.293.400
	2.15.02.02.2.07 04.	Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi Anthallo	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Anthallo	6 Kegiatan	-
	2.15.02.2.08.	Audit dan Inspeksi Kesiapanan LLAJ di jalan	Kabupaten Cirebon	Terseluruhnya Audit dan Inspeksi Kesiapanan	5 Kegiatan	147.063.400
	2.15.02.02.2.08 01.	Pengujian Kepatuhan Auditor dan Inspektor LLAJ	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pengujian Kepatuhan Auditor dan Inspektor LLAJ	30 Orang	-
	2.15.02.02.2.08 02.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Unit Patikatan Uji Berkela Keduaan Bermotor	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya inspeksi Audit dan Pemeriksaan Unit Pelaksana Uji Berkela Keduaan Bermotor	12 Keg	35.091.400
	2.15.02.02.2.08 03.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Terminal	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya inspeksi Audit dan Pemeriksaan Terminal	4 Kegiatan	-
	2.15.02.02.2.08 04.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Kompetensi Peternisidi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Pengujian Kompetensi Pengonudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Keg	45.040.000
	2.15.02.02.2.08 05.	Pelaksanaan Kompetensi Audit dan Pemeriksaan Sistem Manajemen Kesiapanan dan Umum	Kabupaten Cirebon	Terlaksananya inspeksi Audit dan Pemeriksaan Sistem Manajemen Kesiapanan dan Umum	6 Keg	46.957.000
	2.15.02.2.09.	Perrydaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Dicirik Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Penerapan Perijinan dalam Penyelenggaran Angkutan	100 Dok	136.141.200
	2.15.02.02.2.09 01.	Sistem Apkasi		Terseluruhnya Sistem Apkasi	45.548.700	

		Kabupaten Cirebon	Tersedianya Koordinasi dan Monitoring dan Tracing	I. Kegiatan	B.5.972.600
2.15.02.02.2.09 .02.	Perbaikan Kehilangan Penyelesaian Ketersediaan Angkutan Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang Ambar Kota dalam I (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dokument Penyelesaian Kawasan Perikatan untuk Angkutan Sosial dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kawasan Perikatan untuk Angkutan Perikatan Kawasan Kabupaten/Kota	I. Dok	-
2.15.02.02.2.10 .01.	Perbaikan Kehilangan Penyelesaian Ketersediaan Angkutan Sosial dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kawasan Perikatan untuk Angkutan Perikatan Kawasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya kesiabilitas dan uji coba kebijakan penyelesaian kawasan perikatan terhadapnya berdasarkan sasaran dan tujuan kebijakan penyelesaian kawasan perikatan dalam I (Satu) kabupaten	I. Ing	-
2.15.02.02.2.10 .02.	Perbaikan Kehilangan Penyelesaian Kebijakan Rencana Kawasan Perikatan untuk Angkutan Perikatan Kawasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya dok penyelesaian mencari umum jaringan struktur perikatan dalam I (Satu) kabupaten	I. Dok	+
2.15.02.02.2.11 .01.	Pelaksanaan Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trasyek Trasyek Perikatan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trasyek	I. Dok	+
2.15.02.2.12.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trasyek Pedesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trasyek Pedesaan	I. Dok	-
2.15.02.02.2.12 .01.	Perbaikan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trasyek Pedesaan Kawasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trasyek Pedesaan Kawasan Kabupaten/Kota	I. Kegiatan	-
2.15.02.02.2.12 .02.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trasyek Pedesaan Kawasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Sosialisasi dan Uji Coba	I. Keg	+
2.15.02.2.14.	Penetapan Izin Penyelegaraan Angkutan Orang dalam Trasyek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen Penyelegaraan Angkutan dalam Trasyek Lintas daerah	I. Dok	99.385.400
2.15.02.02.2.14 .01.	Fasilitasi pemerintah penyelesaian izin penyelegaraan angkutan orang dalam trasyek lintas daerah secara elektronik	Kabupaten Cirebon	Terpenuhinya Penyelesaian Izin Penyelegaraan Angkutan Orang Trasyek Lintas Daerah secara elektronik	I. Dokumen System	45.593.600
2.15.02.02.2.14 .02.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Penyelegaraan Angkutan Orang dalam Trasyek Kawasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pengembangan Pelaksanaan Izin Penyelegaraan Angkutan dalam Trasyek	I. Dok	49.791.800
2.15.02.2.16.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melalui Trasyek serta Angkutan Perikatan dan Perdesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang	I. Dok	-
2.15.02.02.2.16 .01.	Analisa Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikatan dan Perdesaan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penyelesaian Amilia tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang	I. Kegiatan	-
2.15.02.02.2.16 .03.	Pengabdian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikatan dan Perdesaan dalam I (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Pengembangan dan Pengawasan Tarif	I. Kegiatan	-
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Meningkatnya proses dan pemrosesan perjalanan	I. Proses	-
2.15.03.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelautan Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Bergelar Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Dokumen dan Aplikasi perizinan peritiman usaha secara elektronik	I. Dok	0
2.15.03.2.02 .01.	Fasilitasi Penerbitan Perorangan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Banyak Kawasan	Kabupaten Cirebon	Tersedianya Penerbitan Dokumen dan Aplikasi pelayaran peritiman usaha secara elektronik	I. Apk/Land	-

	Kelengkapan Kicia dalam Sistem Pelayaran Peritman: Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan Cirebon	1 kg
215.03.03.2.02 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengiriman Pesawaran Izin Usaha Angutan Laut Pelepasan: Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Teriklaimnya koordinasi dan sinkronisasi pengiriman izin usaha angutan laut. Dokumen evakuasi krigalan	-
215.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perwatan dan Perbaikan Kapal	Tersediannya Dokumen Pelayanan Peritman Usaha Perawatan dan Perbaikan kapal secara elektronik	1 Dok 0
215.03.03.1.08 .01	Fasilitasi Pemerintahan Pengoperasian Perwatan Izin Usaha jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Peritman Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Cirebon Teriklaimnya Pemfasian Aplikasi Pelayanan Peritman terkait Perawatan dan Perbaikan Kapal secara elektronik	2 Dok -
215.03.03.2.08 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengiriman Pesawaran Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perwatan dan Perbaikan Kapal	Kecamatan Cirebon Teriklaimnya Pengiriman Pengoperasian Perwatan dan Perbaikan Kapal	1 Dokumen kegiatan -
J U M L A H			67,356,237,639

BAB IV. PENUTUP

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas diharapkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan diperoleh hasil kerja yang optimal sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan semua kegiatan baik kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, penting untuk keterpaduan dasar kegiatan antar program. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan program-program rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
2. Pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Dalam membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan pendapat publik;
4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan kondisi barang;
5. Belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan diterapkan secara optimal sehingga usia pakai sarana dan prasarana dapat dipertahankan untuk menunjang pelayanan penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

6. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja;
7. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD;
8. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya sebuah perencanaan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan tidak berarti telah tertutup kemungkinan untuk terjadinya perubahan-perubahan, oleh karena itu untuk tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang optimal, maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ini dapat berubah sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.

Sumber, Juli 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON,


Drs. H. ASDULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001